



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



APBN Responsif di Tengah
Peningkatan Risiko Global,
Menjaga Daya Beli, dan
Momentum Pemulihan Ekonomi

Edisi Mei 2022

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Fokus kita saat ini melakukan konsolidasi APBN, menjaga pemulihan ekonomi, menjaga daya beli rakyat, menjaga kesehatan APBN, serta kerja sama dengan seluruh K/L dan DPR agar APBN terus terjaga.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	17
Perkembangan Ekonomi Makro	21
Laporan Khusus	24
Penerimaan Pajak	51
Penerimaan Bea dan Cukai	63
Penerimaan Negara Bukan Pajak	69
Belanja Pemerintah Pusat	77
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85
Pembiayaan Utang	91





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur

Strategi dan Portofolio

Pembiayaan, Kepala Pusat

Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain**

Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.

1, Jakarta.

Pendapatan Negara sebesar Rp853,55 triliun atau meningkat 45,94 persen (*yoy*) dari target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp268,69 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp567,69 triliun (44,88 persen dari target atau tumbuh 51,49 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp108,38 triliun (44,24 persen dari target atau tumbuh 37,66 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp177,37 triliun (52,86 persen dari target atau tumbuh 35,04 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp113,60 miliar, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp52,64 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp508,03 triliun atau 26,13 persen dari pagu APBN 2022 dan meningkat 3,71 persen (*yoy*) dari realisasi periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp489,84 triliun., yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp253,58 triliun (26,81 persen dari pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp278,55 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp254,45 triliun atau meningkat 20,43 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp242,43 triliun (31,50 persen dari alokasi APBN 2022) atau meningkat 3,95 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Tekanan inflasi global dampak dari konflik geopolitik mendorong normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik. Selanjutnya, hal ini menimbulkan volatilitas dan tekanan di pasar keuangan global. Kondisi ini memberikan *downside risk* terhadap prospek perekonomian global. Harga komoditi global masih mengalami peningkatan dan memberi tekanan pada inflasi domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, kasus covid-19 global dan Indonesia terus menurun dan akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi. Pemerintah akan tetap mewaspadai perkembangan eskalasi risiko global saat ini terutama tekanan terhadap inflasi.

Hingga akhir April 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp853,55 triliun atau 46,23 persen terhadap target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp268,69 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara masih terus berlanjut yang juga tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 45,94 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp676,07 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp177,37 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp0,11 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 49,09 persen (yoy) dan 35,04 persen (yoy). Lebih

lanjut, capaian masing-masing komponen pendapatan negara dari perpajakan dan PNBP terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 44,77 persen dan 52,86 persen.

Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak realisasinya hingga akhir April 2022 tercatat sebesar Rp567,69 triliun atau telah mencapai 44,88 persen terhadap target pada APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 51,49 persen secara yoy. Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 60,33 persen dan 33,84 persen. Hingga akhir April 2022, realisasi PPh Nonmigas secara nominal masih ditopang oleh capaian dari empat komponen terbesar penerimaannya yaitu PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh 22 Impor. Jika dilihat dari pertumbuhannya, PPh Nonmigas tumbuh 58,39 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan seluruh penerimaan komponen PPh Nonmigas. Realisasi empat komponen terbesar PPh Nonmigas tumbuh berturut-

turut PPh 25/29 Badan tumbuh 105,28 persen (yoy), PPh 21 tumbuh 26,28 persen (yoy), PPh Final tumbuh 6,31 persen (yoy), dan PPh 22 Impor tumbuh 172,82 persen (yoy). Pertumbuhan komponen utama penerimaan PPh Nonmigas tersebut menunjukkan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor penyampaian SPT PPh Badan di akhir April 2022 dan aktivitas ekonomi di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Selain itu, kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh kenaikan harga komoditas yang masih berlanjut sejak tahun 2021 dan adanya program PPS. Sementara itu, kinerja penerimaan pajak secara sektoral dikontribusi oleh kinerja penerimaan pada sektor komoditas, seperti sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan yang tumbuh cukup signifikan. Lebih lanjut, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal masih ditopang terutama oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif PPN/PPnBM tumbuh cukup signifikan sebesar 39,68 persen (yoy). Pertumbuhan komponen penerimaan PPN DN didorong oleh aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan

dengan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, serta menjelang kenaikan tarif PPN. Selain itu, seiring konsumsi dalam negeri yang terus membaik, kegiatan impor juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga kinerja PPN Impor terdorong tumbuh positif. (rincian pnpb lainnya akan dicek kembali)

Realisasi penerimaan komponen perpajakan dari Kepabeanaan dan Cukai capaiannya hingga akhir April 2022 sebesar Rp108,38 triliun atau telah mencapai 44,24 persen terhadap target pada APBN 2022. Kinerja penerimaan tersebut tumbuh 37,66 persen (yoy). Secara nominal, penerimaan Kepabeanaan dan Cukai didukung terutama oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang kontribusinya mencapai 70,39 persen dari total realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai tercatat tumbuh positif dan signifikan yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK), dimana penerimaan Cukai dan BM tumbuh masing-masing 30,82 persen (yoy) dan 33,20 persen (yoy). Khusus untuk pertumbuhan

komponen penerimaan dari BK, tercatat masih tumbuh sangat signifikan mencapai 102,05 persen (yoy). Capaian penerimaan Kepabeanaan dan Cukai tersebut didorong terutama oleh kinerja CHT yang konsisten tumbuh melanjutkan tren di tahun 2021, serta didukung juga oleh kinerja perpajakan internasional seiring dengan tren kenaikan harga komoditas dan aktivitas ekspor impor sejak awal tahun 2022 yang masih tumbuh positif. Faktor yang mendorong kinerja penerimaan CHT yaitu dampak penyesuaian kebijakan tarif cukai rokok dan limpahan pelunasan cukai rokok tahun 2021. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari BM kinerjanya didorong oleh kinerja impor nasional seiring meningkatnya konsumsi dan semakin membaiknya pemulihan ekonomi. Penerimaan komponen BK mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan didorong oleh tumbuhnya volume ekspor terutama komoditas produk CPO dan turunannya. Pertumbuhan BK juga dipengaruhi oleh membaiknya permintaan global yang mendorong peningkatan harga komoditas andalan Indonesia yang dikenai tarif BK lebih tinggi.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp177,37 triliun (52,86 persen dari pagu APBN 2022), atau tumbuh positif 35,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Peningkatan capaian realisasi tersebut utamanya bersumber dari realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBP Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp74,44 triliun atau tumbuh positif sebesar 122,42 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Selanjutnya, PNBP yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp25,10 triliun atau tumbuh positif 77,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi PNBP Lainnya, realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp57,60 triliun atau tumbuh positif sebesar 10,91 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian PNBP Lainnya

antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, pendapatan Kembali Belanja TAYL, pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio, pendapatan yang berasal dari layanan Kepolisian, pendapatan dari sektor kesehatan, perlindungan sosial dan keagamaan, serta pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum. Berbeda dengan sumber penerimaan lainnya, PNBP yang bersumber dari pendapatan BLU masih mengalami pertumbuhan negatif, sampai dengan akhir April 2022 capaian realisasinya sebesar Rp 20,23 triliun atau tumbuh negatif sebesar 36,36 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp750,46 triliun (27,65 persen dari pagu APBN 2022), tumbuh 3,79 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi

realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp508,03 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp242,43 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 April 2022 meningkat 3,71 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode April 2022 diantaranya karena peningkatan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang masing-masing sebesar 8,90 persen dan 15,82 persen (yoy). Peningkatan pada realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pensiunan. Sementara itu, pertumbuhan pada realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang dikarenakan Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan pada bulan-bulan berikutnya melalui penyaluran bansos dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2022 mencapai Rp56,63 triliun (27,36 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 39,01 persen secara yoy.

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp46,36 triliun yang jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp36,94 triliun atau tumbuh 25,48 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp10,27 triliun sedangkan periode yang sama pada tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp3,79 triliun atau tumbuh 170,71 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi energi mencapai 34,59 persen dari pagu APBN 2022 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp34,77 triliun (44,84 persen dari pagu), atau mengalami peningkatan 25,48 persen (yoy).

Realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg tersebut merupakan pembayaran untuk subsidi pada tahun berjalan sebesar Rp24,60 triliun, yang meningkat 17,35 persen (yoy), dan pembayaran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10,17 triliun.

Peningkatan realisasi subsidi

BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 66,38 persen (yoy) selama periode Januari-April 2022 dan kenaikan volume LPG sebesar 4,70 persen (yoy) selama Januari-Maret 2022. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp11,59 triliun atau 20,51 persen dari pagu.** Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi subsidi listrik lebih rendah sebesar 15,47 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-April 2022 sebesar Rp10,27 triliun, atau 14,08 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp8,34 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp1,79 triliun, dan subsidi PSO sebesar Rp0,14 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, realisasi subsidi nonenergi mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 170,71 persen. Hal ini antara lain didorong oleh pertumbuhan realisasi subsidi kredit program yang sangat signifikan dari periode Januari-April tahun lalu yang hanya sebesar Rp712,36 miliar

menjadi sebesar Rp8,34 triliun pada periode yang sama tahun ini atau tumbuh sebesar 1.070,94 persen. Selain itu, jika dilihat dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi juga terjadi peningkatan sebesar 12,37 persen atau telah disalurkan sebanyak 2,91 juta ton pada Januari-April 2022 sedangkan pada periode yang sama tahun lalu hanya tersalurkan sebanyak 2,60 juta ton. Adapun realisasi volume pupuk organik cair tercatat hingga April 2022 adalah sebanyak 46,30 ribu liter sedangkan pada tahun lalu di periode yang sama belum terdapat penyaluran karena pupuk organik cair baru disalurkan sejak Mei 2021. Selanjutnya jenis subsidi non-energi lainnya masih belum terdapat realisasi disebabkan oleh adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp242,43 triliun atau 31,50 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp9,22 triliun atau 3,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi TKDD bersumber

dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,13 triliun (31,38 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp22,30 triliun (32,79 persen dari pagu APBN 2022).

Realisasi TKD sampai dengan 30 April 2022 lebih tinggi Rp3,78 triliun atau tumbuh minim sebesar 1,75 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2021. Lebih tingginya realisasi TKD tersebut disebabkan oleh: (i) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi Rp20,10 triliun (14,96 persen yoy) imbas dari peningkatan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam menyampaikan syarat salur DAU, (ii) realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY lebih tinggi Rp1,49 triliun (30,81 persen yoy) sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur, dan (iii) realisasi Dana Insentif Daerah (DID) lebih tinggi Rp0,12 triliun (21,47 persen yoy) seiring dengan perbaikan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur DID.

Selanjutnya, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan April 2022 mencapai Rp18,32 triliun, lebih rendah Rp16,53 triliun atau

terkontraksi 47,44 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Realisasi DBH yang lebih rendah terjadi akibat adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH pada bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp19,47 triliun. Adapun DBH reguler di tahun 2022, realisasi penyaluran sebesar Rp18,32 triliun lebih tinggi 19,08 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp15,39 triliun. Penurunan realisasi juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik yang masing-masing turun Rp0,12 triliun (minus 13,49 persen yoy) dan Rp1,27 triliun (minus 3,11 persen yoy) dibandingkan realisasi tahun 2021.

Sementara itu, sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat salur Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran Dana Desa sampai dengan April 2022 lebih tinggi Rp5,45 triliun atau tumbuh cukup signifikan 32,31 persen dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021.

Defisit fiskal pada APBN 2022 dianggarkan sebesar 4,85 persen, lebih rendah dari target tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan komitmen

Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal dimana pada tahun 2023 defisit fiskal Indonesia kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun, terutama diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun sesuai pagu APBN 2022. **Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat surplus anggaran pada akhir April 2022 sebesar Rp103,09 triliun atau sekitar 0,58 persen dari PDB.** Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir April 2022 ini sudah mencapai Rp142,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir April 2022 mencapai Rp155,87 triliun (16,0 persen dari Pagu APBN 2022). Realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp142,23 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,65 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp343,90 miliar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp13,30 triliun. Hingga Akhir April 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp832,70

miliar namun Pemerintah juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp488,70 miliar. Pada sisi lain, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp40,37 triliun namun Pemerintah juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp27,07 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp14,90 triliun dari Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp15,00 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp102,40 miliar. Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir April 2022 terealisasi sebesar Rp1,59 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp98,70 miliar hingga akhir April 2022.

Halaman Ini Dikosongkan



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 30 April 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,58 persen terhadap PDB (sampai dengan 30 April 2021 defisit APBN sebesar 0,81 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp853,55 triliun atau meningkat 45,94 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp750,46 triliun atau 27,65 persen terhadap pagu APBN 2022 dan meningkat 3,79 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri atas:

- Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp676,07 triliun (44,77 persen dari pagu APBN 2022 dan tumbuh 49,09 persen (yoy), terdiri atas Penerimaan

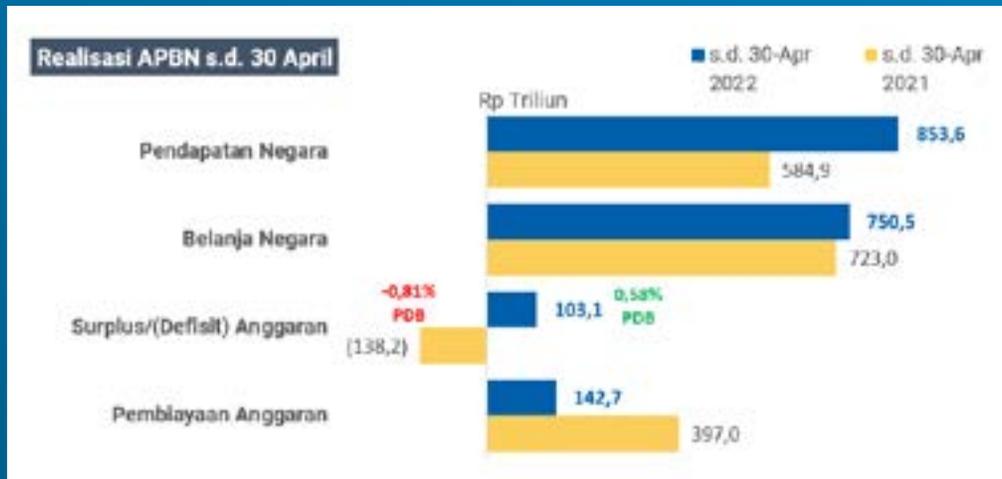
Pajak sebesar Rp567,69 triliun (44,88 persen dari target atau tumbuh 51,49 persen (yoy)) dan Penerimaan Kepabebean dan Cukai sebesar Rp108,38 triliun (44,24 persen dari target atau tumbuh 37,66 persen (yoy)).

- PNBP sampai dengan 30 April 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp177,37 triliun (52,86 persen dari target atau tumbuh 35,04 persen (yoy)).

- Penerimaan Hibah sampai dengan 30 April 2022 telah terealisasi sebesar Rp113,60 miliar, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp52,64 miliar.

Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar 27,65 persen dari pagu APBN 2022, terdiri atas:

Realisasi APBN s.d 30 April 2022



Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer

APBN (Triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 30 Apr	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 30 Apr	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.743,85	584,87	33,54	6,45	1.846,14	853,95	46,28	45,94
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,75	584,81	33,56	6,61	1.845,96	853,44	46,24	45,93
1. Penerimaan Pajak	1.444,54	453,47	31,39	4,42	1.510,00	676,07	44,77	49,99
a. PPh	1.228,58	374,74	30,48	(5,50)	1.265,00	567,69	44,88	51,49
b. Kebeherasan dan Cukai	214,96	78,73	36,63	35,55	245,00	108,38	44,24	37,66
2. PNBP	299,20	131,34	44,04	14,93	335,96	177,37	52,86	35,04
3. Penerimaan Hibah	0,90	0,05	5,83	(94,84)	0,58	0,11	19,59	115,80
B. Belanja Negara	2.700,53	723,05	26,79	15,95	2.714,14	750,46	27,65	3,79
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	489,84	25,06	23,65	1.944,54	508,83	26,13	3,71
1. Belanja K/L	1.624,46	378,55	23,31	37,18	945,75	253,58	26,81	(8,96)
2. Belanja non K/L	329,99	111,29	33,74	17,74	998,79	254,45	25,60	20,43
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	233,21	29,32	(3,37)	799,61	242,43	30,30	3,95
1. Transfer ke Daerah	723,48	216,35	29,90	(1,81)	707,61	220,13	31,18	1,70
2. Dana Desa	72,00	16,85	23,41	(13,72)	92,00	22,30	24,23	32,31
C. Keseimbangan Primer	(633,12)	(138,18)	5,76	(29,23)	(462,15)	(102,87)	(47,79)	795,31
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.006,38)	(138,18)	13,73	(91,48)	(868,02)	(102,89)	(11,88)	174,60
= Surplus/(Defisit) thd PDB	(3,72)	(0,81)			(4,43)	0,58		
E. Pembayaan Anggaran	1.006,38	397,01	39,45	75,32	868,02	142,67	16,44	(34,90)
Ketebalan/(Ketukangan) Pembayaan Anggor	-	258,83			-	245,75		

dalam Triliun Rupiah

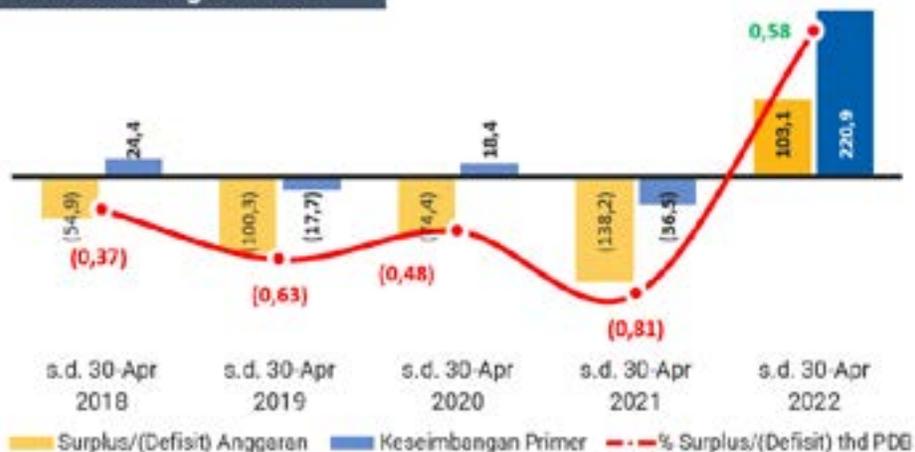
· Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp508,03 triliun atau 26,13 persen dari pagu APBN 2022 dan meningkat 3,71 persen (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp489,84 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp253,58 triliun (26,81 persen dari pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp278,55 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp254,45 triliun atau meningkat 20,43 persen (yoy).

· Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp242,43 triliun (31,50 persen

dari alokasi APBN 2022), meningkat 3,95 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp233,21 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 30 April 2022 mengalami surplus sebesar Rp103,09 triliun (0,58 persen terhadap PDB) dan keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp220,87 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp142,67 triliun, sehingga sampai dengan 30 April 2022 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp245,75 triliun.

Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer





Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian nasional terus menguat dengan PDB Kuartal I tahun 2022 tumbuh

5,01 persen (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi di Kuartal I tahun 2022 ini sangat krusial dalam memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi kedepan. Pertumbuhan PDB Kuartal I tahun 2022 didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat, terutama pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu kepercayaan pelaku usaha

dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan mendorong aktivitas investasi swasta. Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi, sedangkan ekspansi produksi turut mendorong pertumbuhan impor. Pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan memberikan andil kinerja PDB Kuartal I tahun 2022 dari sisi produksi. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2022 tercatat di level 5,83 persen, lebih rendah

dibandingkan Februari 2021 sebesar 6,26 persen.

Perkembangan ekonomi yang kuat masih berlanjut di Kuartal II tahun 2022.

Perkembangan kasus Covid-19 nasional yang terkendali telah mendorong kebijakan relaksasi aktivitas masyarakat, bahkan masyarakat dapat melakukan aktivitas mudik pada lebaran tahun ini. Beberapa *leading indicator* konsumsi dan produksi terus memberikan gambaran positif perkembangan ekonomi nasional di kuartal II 2022. Dari sisi konsumsi, belanja masyarakat meningkat tajam yang diperlihatkan dengan indikator *Mandiri Spending Index* (MSI) di April 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus berada di atas level optimis, serta Indeks Penjualan Ritel yang terus meningkat. Dari sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia terus berada dalam level ekspansi dalam delapan bulan terakhir. Kondisi Covid-19 yang terus membaik dan perbaikan permintaan masyarakat diyakini akan memperkuat aktivitas produksi dan penjualan.

Stabilitas pasar keuangan domestik sedikit mengalami tekanan namun masih terkendali, pasca kenaikan FFR.

Pasar saham domestik menurun dan IHSG tercatat 6.914 pada 24 Mei 2022 setelah sebelumnya berada di atas level 7.000-an. Nilai tukar Rupiah juga sedikit tertekan tercatat sebesar Rp14.653 per USD pada 24 Mei 2022. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 2,68 persen dibandingkan awal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 24 Mei 2022 adalah sebesar Rp14.383 per USD. Di sisi lain, inflasi mengalami tekanan terutama didorong peningkatan *demand* dan kenaikan harga pangan global serta faktor cuaca. Inflasi pada bulan April 2022 tercatat sebesar 3,47 persen (*yoy*) atau 2,14 persen (*ytd*). Kedepan, Pemerintah tetap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan ketersediaan pasokan hingga ke daerah. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir April 2022 sedikit menurun menjadi sebesar USD135,7 miliar, dibandingkan dengan per akhir Maret 2022 sebesar USD139,1

miliar. Posisi cadangan devisa ini diyakini masih mampu untuk mendukung ketahanan nasional dari gejolak eksternal.

Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terus menurun selama Kuartal I tahun 2022 telah mendorong peningkatan mobilitas dan turut menggerakkan sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti hotel, transportasi, dan restoran. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2022 mencapai 40,79 ribu kunjungan, meningkat 206,25 persen dibandingkan dengan kunjungan Maret 2021. Demikian pula, jumlah kunjungan wisman tersebut

juga meningkat sebesar 121,02 persen dibandingkan Februari 2022. Selama Kuartal I tahun 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 74,38 ribu kunjungan, meningkat lebih 2 kali lipat dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 45,15 persen pada Maret 2022 meningkat 9,08 poin dibandingkan kondisi Maret 2021 dan meningkat 6,61 poin dibandingkan Februari 2021.

Memotret Pelajaran dari Pandemi Melalui Survei

Menginjakkan kaki di tahun 2022 ini, telah tampak tanda-tanda bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir. Geliat ekonomi pun kembali terasa, mulai mendekati kondisi sebelum pandemi. Sebagai pelajaran dari situasi pandemi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah, penting bagi kita untuk memiliki dokumentasi potret dampak pandemi bagi pelaku usaha. Termasuk bagaimana pemanfaatan stimulus bagi

dunia usaha selama pandemi dimaksud.

Sebagai upaya memotret dampak pandemi dan pemanfaatan insentif fiskal bagi pelaku usaha, Kementerian Keuangan telah melakukan Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sasaran Wajib Pajak strategis sebanyak tiga kali. Survei PEN I diselenggarakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020, dan Survei PEN II pada tanggal 8 Desember sampai dengan

28 Desember 2020. Terakhir, Survei PEN III dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 yang bertujuan mengevaluasi pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha sepanjang semester I 2021.

Hasil analisis Survei PEN I dan Survei PEN II telah didiskusikan di dalam Laporan Khusus APBN KiTA Edisi Mei 2021 dengan judul 'Peran Stimulus Pajak dalam Membantu Ketahanan Pelaku Usaha pada Masa Pandemi'. Pada edisi kali ini, mari kita simak bagaimana potret pelajaran dari pandemi yang bisa kita ambil melalui penyelenggaraan Survei PEN III.

Metode Survei dan Profil Responden

Survei PEN III berfokus untuk menjawab pertanyaan tentang (1) bagaimana gambaran dampak pandemi terhadap pelaku usaha pada semester I 2021, dan (2) bagaimana gambaran pemanfaatan insentif fiskal—yang meliputi insentif pajak, insentif bea dan cukai, serta insentif PNBPN—oleh pelaku usaha pada periode tersebut. Namun, karena keterbatasan tempat, pembahasan disini hanya berfokus pada analisis terkait

insentif pajak.

Insentif pajak yang difokuskan dalam survei ini adalah lima insentif pajak yang diatur di dalam PMK 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yaitu (1) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP), (2) PPh Final UMKM DTP, (3) pembebasan PPh Pasal 22 Impor, (4) pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan (5) pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Demi menjaga efisiensi dan kualitas survei seperti pada survei PEN sebelumnya, pelaksanaan Survei PEN III tetap dilakukan secara daring dan bersifat anonim. Karena anonim, setiap Survei PEN diharapkan dapat seobjektif mungkin menangkap aspirasi pelaku usaha di Indonesia. Sepanjang pelaksanaan survei sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 30 Juli 2021, sebanyak 7.528 pelaku usaha mengikuti survei ini. Hasil uji keterwakilan (*representativeness tests*) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa responden survei adalah representasi yang sangat baik dari populasi target responden sebanyak 286.592

pelaku usaha baik dari segi sebaran lokasi usaha maupun sebaran omset tahunan.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (64 persen atau 4.855 pelaku usaha) belum pernah mengikuti Survei PEN I dan II. Responden survei berasal dari seluruh Indonesia mewakili 34 provinsi di mana mayoritas (72 persen) berlokasi di Pulau Jawa.

Setengah responden (49 persen atau 3.723 pelaku usaha) memiliki umur usaha yang belum melebihi 10 tahun, yaitu tahun dimulainya usaha adalah tahun 2011 atau setelahnya. Kemudian, pelaku usaha dari sektor usaha Jasa Lainnya (23 persen atau 1.702 pelaku usaha) dan Perdagangan (22 persen atau 1.644 pelaku usaha) menempati porsi dua terbesar untuk sebaran sektor usaha. Responden berbentuk badan usaha sebanyak 90,1 persen atau 6.781 pelaku usaha, dan sisanya sebanyak 9,9 persen atau 747 pelaku usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Mayoritas responden (63 persen atau 4.761 pelaku usaha) memiliki pekerja tetap antara 2-50 orang.

Selanjutnya, lebih dari setengah responden (54 persen atau 4.071 pelaku usaha) melaporkan memiliki omset tahunan sebesar Rp 5 miliar ke atas, dan terdapat 13 persen atau 955 pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 100 miliar per tahun. Selanjutnya, mayoritas responden (82 persen atau 6.139 pelaku usaha) menjadikan pasar dalam negeri sebagai pangsa pasar utama.

Terakhir, mayoritas pihak pengisi survei (63 persen) memegang posisi pengambil keputusan atau jabatan manajerial, di mana 39 persen pengisi survei berada di *high-level management* dan 24 persen pengisi berada di *mid-level management*. Sisanya, 37 persen pengisi survei, menempati jabatan setingkat staf. Sehingga, survei ini secara umum diisi oleh pihak yang memahami kondisi usaha secara komprehensif.

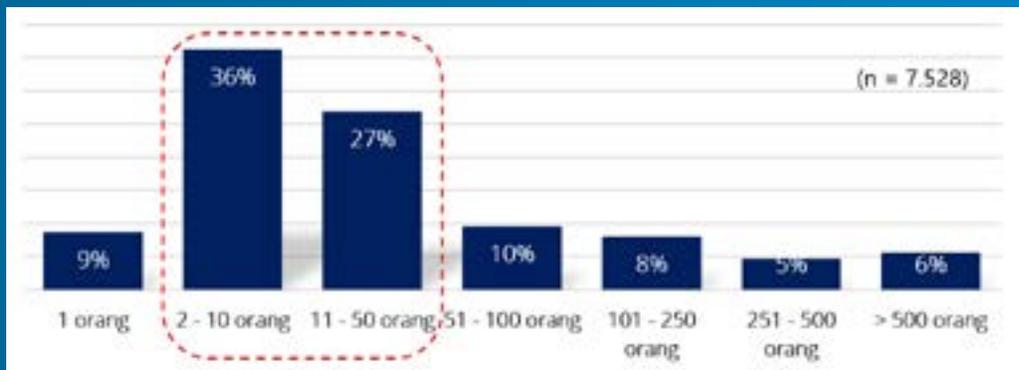
Dampak Pandemi bagi Dunia Usaha

Mayoritas responden (72 persen atau 5.425 pelaku usaha) masih mengalami penurunan aktivitas usaha/produksi pada semester I 2021 dibandingkan kondisi usaha pada tahun 2020. Bahkan,

Sebaran Geografis Pelaku Usaha



Jumlah Pekerja Tetap Pelaku Usaha

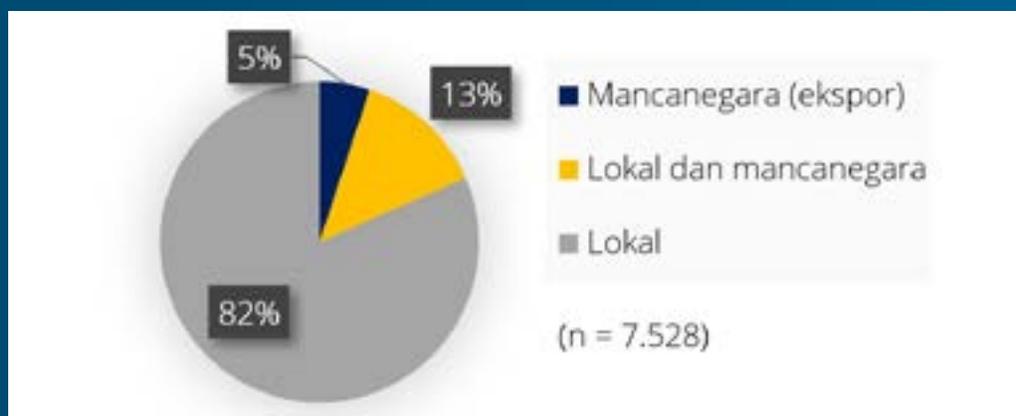


terdapat 34 persen atau 2.542 pelaku usaha yang mengalami penurunan aktivitas usaha lebih dari 30 persen. Kemudian, terdapat 14 persen pelaku usaha yang aktivitas usahanya sudah mengalami pemulihan

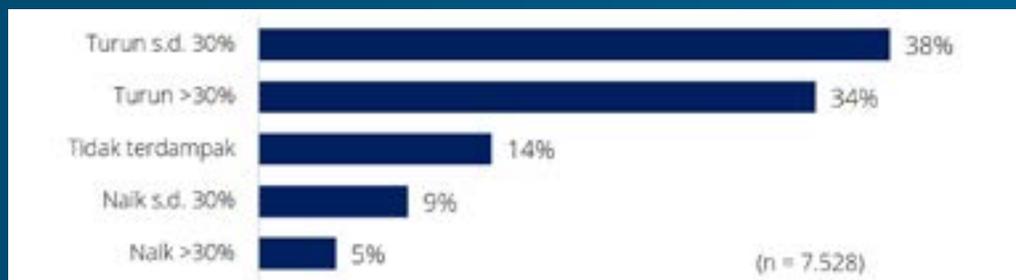
(*recovery*), dan proporsi yang sama untuk pelaku usaha yang aktivitas usahanya relatif sama dengan kondisi pada tahun 2020.

Dari aspek kecukupan kas usaha, 42 persen atau 3.198

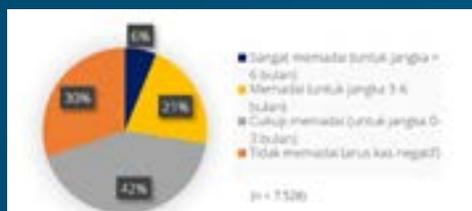
Pangsa Pasar Utama Pelaku Usaha



Kondisi Aktivitas Usaha/Produksi Semester I 2021 vs 2020



Kondisi Kecukupan Kas Aktivitas Usaha



Kondisi Penggunaan Kapasitas Usaha/Produksi



pelaku usaha mengaku memiliki kas usaha yang memadai untuk periode tiga bulan, yaitu sejak bulan pelaksanaan survei pada Juli 2021 sampai dengan September 2021. Namun, masih terdapat 30 persen atau 2.264 pelaku usaha yang kas usahanya sudah tidak memadai lagi untuk membiayai operasional usaha pada saat survei dilaksanakan.

Selanjutnya, terdapat 24 persen atau 1.838 pelaku usaha yang penggunaan kapasitas usahanya telah melebihi 80 persen dari kapasitas optimal. Di sisi lain, masih terdapat 34 persen atau 2.567 pelaku usaha yang penggunaan kapasitas usahanya kurang dari 50 persen kapasitas optimalnya.

Kesulitan usaha terbesar selama semester I 2021 yang dihadapi pelaku usaha adalah penurunan permintaan (dipilih oleh 47 persen atau 3.534 pelaku usaha) dan penerapan protokol kesehatan yang menyebabkan kapasitas usaha belum maksimal (dipilih oleh 32 persen atau 2.421 pelaku usaha). Kesulitan usaha berikutnya adalah tingginya biaya produksi (10 persen), kendala pasokan bahan baku

(6 persen), dan kendala dalam distribusi produk (5 persen).

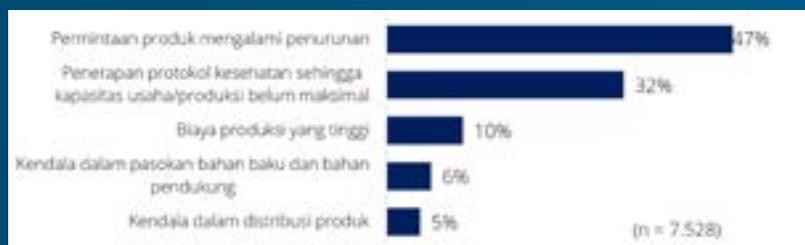
Dalam rangka bertahan dan dapat tetap berkembang di tengah kesulitan usaha akibat dampak pandemi Covid-19, pengaturan ulang terkait pegawai—meliputi jumlah pegawai, jam kerja, dan gaji—adalah strategi utama yang paling banyak digunakan pelaku usaha (dipilih oleh 30 persen atau 2.225 pelaku usaha). Strategi utama berikutnya adalah pengetatan biaya produksi (25 persen) dan peningkatan penjualan produk (23 persen). Penutupan unit usaha demi efisiensi adalah strategi utama yang paling jarang digunakan (5 persen).

Pemanfaatan Insentif Pajak

Berdasarkan hasil survei, setengah responden (51 persen atau 3.876 pelaku usaha) mengaku telah memanfaatkan insentif pajak pada semester I 2021. Sedangkan sisanya yakni 49 persen responden belum memanfaatkan insentif pajak.

Dari kelompok responden yang belum memanfaatkan insentif, mayoritas (55 persen) beralasan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup terkait insentif pajak yang ada. Sedangkan sisanya antara lain

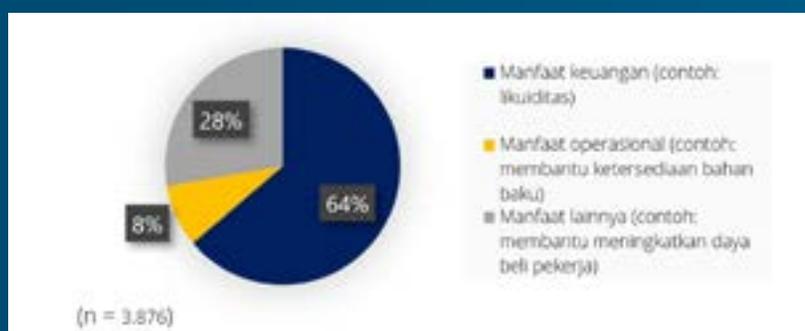
Kesulitan yang Paling Mempengaruhi Aktivitas Usaha Selama Semester I 2021



Strategi Utama Pelaku Usaha dalam Mempertahankan Keberlangsungan Usaha



Manfaat Terbesar yang Didapatkan Pelaku Usaha dari Insentif Pajak



karena sektor usahanya saat itu tidak memenuhi syarat sebagai penerima insentif (22 persen) dan insentif pajak memang bukan menjadi prioritas pada saat itu (13 persen).

Dari 3.876 responden yang telah memanfaatkan insentif pajak, 64 persen (2.480 pelaku usaha) menyatakan bahwa manfaat utama insentif pajak adalah manfaat keuangan yakni membantu likuiditas mereka. Di sisi lain, 8 persen (311 pelaku usaha) menyatakan bahwa insentif pajak memberikan manfaat bagi operasional usahanya.

Dari 3.876 responden yang menjawab sebagai pemanfaat insentif, 75 persen (2.918 pelaku usaha) menyatakan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Kemudian, dari 2.918 pemanfaat insentif ini, mayoritas (93 persen) menyatakan bahwa insentif tersebut sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi mereka. Konsisten dengan itu, 94 persen responden menyatakan tertarik atau sangat tertarik untuk memanfaatkan kembali insentif PPh Pasal 21 DTP di masa mendatang.

Selanjutnya, hasil survei mengungkapkan bahwa dari 3.876 pemanfaat insentif pajak, seperlima (21 persen atau

826 responden) memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP. Dari 826 pemanfaat insentif ini, 53 persen menyatakan sangat bermanfaat dan 39 persen menyatakan bermanfaat. Sejalan dengan itu, mayoritas (92 persen) menyatakan tertarik atau sangat tertarik lagi untuk memanfaatkannya di masa mendatang.

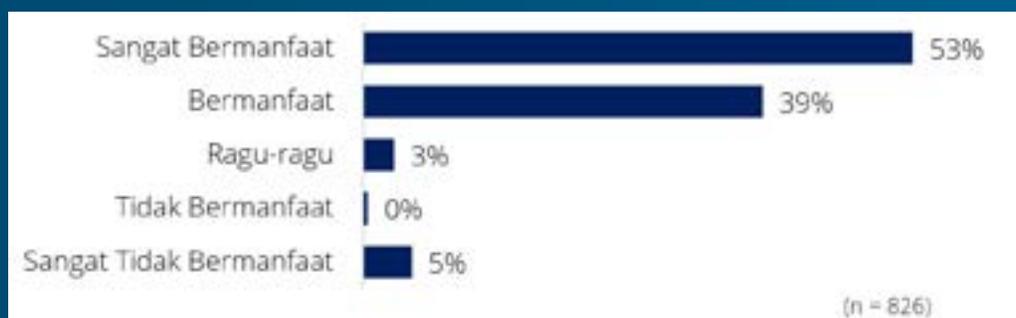
Berikutnya, dari 3.876 responden pemanfaat insentif pajak, lebih dari seperempatnya (27 persen atau 1.039 pelaku usaha) memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Dari 1.039 pemanfaat insentif ini, 67 persen menyatakan sangat bermanfaat dan 28 persen menyatakan bermanfaat. Mayoritas (95 persen) juga menyatakan sangat tertarik atau tertarik untuk memanfaatkan lagi insentif ini di masa mendatang.

Kemudian, dari kelompok responden pemanfaat insentif pajak, 56 persen (2.152 pelaku usaha) mengaku memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Dari 2.152 pemanfaat insentif ini, mayoritas (95 persen) menyatakan bahwa insentif ini sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi mereka, dan mayoritas (96 persen) juga menyatakan ketertarikan untuk mendaftar kembali atas insentif ini di masa mendatang.

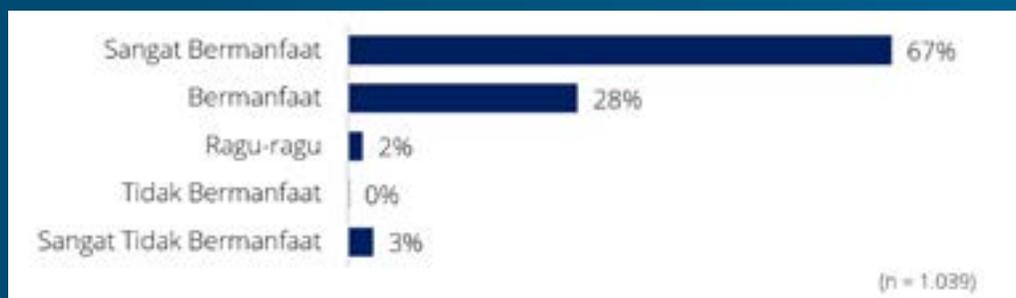
Tingkat Kebermanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP



Tingkat Kebermanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP



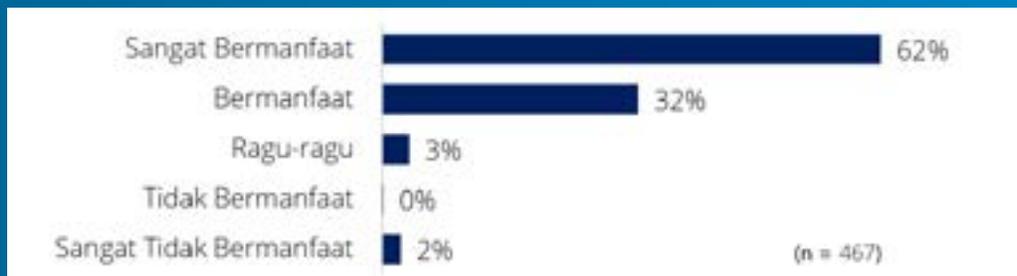
Tingkat Kebermanfaatan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor



Tingkat Kebermanfaatan Insentif Pengurangan PPh Pasal 25



Tingkat Kebermanfaatan Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN



Terakhir, dari 3.876 responden pemanfaat insentif, 12 persen (467 pelaku usaha) menyatakan memanfaatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Dari responden yang memanfaatkan insentif ini, mayoritas (94 persen) menyatakan bahwa insentif ini sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi mereka. Selain itu, mayoritas (94 persen) juga menyatakan sangat tertarik atau tertarik

untuk memanfaatkan lagi insentif ini di masa datang.

Sebagai penutup, dampak pandemi yang dirasakan dunia usaha pada tahun 2021 masih signifikan meskipun tanda-tanda pemulihan sudah terlihat. Insentif pajak yang digulirkan pemerintah turut membantu pemulihan tersebut dan dirasakan bermanfaat oleh dunia usaha. Kehadiran pemerintah terbukti vital di situasi ekonomi yang krusial.

Simplifikasi Aturan Faktur Pajak dalam PER-03/PJ/2022

Pada 31 Maret 2022 lalu, PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak terbit dan mulai berlaku 1 April 2022. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penerbitan aturan ini. Pertama, beberapa ketentuan dalam regulasi sebelumnya masih mengatur hal-hal yang bersifat manual dan belum terotomasi sehingga sudah tidak relevan dengan era digital dan kondisi yang terjadi saat ini. Kedua, sebelum peraturan ini berlaku,

terdapat empat regulasi terpisah pada level Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) yang mengatur mengenai Faktur Pajak yaitu PER-24/PJ/2012, PER-16/PJ/2014, PER-58/PJ/2010, dan KEP-754/PJ/2001. Sehingga, perlu dilakukan simplifikasi menjadi satu aturan Perdirjen yang bersifat komprehensif.

Ketiga, regulasi yang ada masih belum dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan yang terkait dengan Faktur Pajak sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mengurangi

sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Keempat, perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan baru di atas level Perdirjen seperti UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 9 Tahun 2021, dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

Kelima, perlu adanya pedoman teknis dalam pelaksanaan PMK-18/PMK.03/2021. Sebagai contoh, ketentuan tentang kriteria PKP pedagang eceran yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 7 PER-24/PJ/2012 dan Pasal 1 PER-58/PJ/2010 disesuaikan dengan PMK-18/PMK.03/2021.

Selain penyesuaian terkait kriteria PKP pedagang eceran, terdapat pula penyesuaian lain seperti: pengajuan Kode Aktivasi dan Password pertama kali (Pasal 8 PER-24/PJ/2012), pengajuan dan pemberian Sertifikat Elektronik (Pasal 9A PER-17/PJ/2019), permintaan cetak ulang surat pemberian NSFP (Pasal 9 (7) PER-24/PJ/2012), kode dan nomor seri Faktur Pajak VAT refund (Pasal 18 PER-24/PJ/2012), aturan PKP wajib e-Faktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (2) PER-16/PJ/2014), serta rincian media elektronik penyimpanan data Faktur Pajak PKP pedagang eceran (Pasal 6 (3) PER-58/PJ/2010).

Terdapat pula beberapa hal yang perlu dihapus akibat proses penerbitan Faktur Pajak secara elektronik. Pertama, pengadaan Faktur Pajak secara manual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PER-24/PJ/2012. Kedua, Faktur Pajak tidak lengkap karena Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PER-24/PJ/2012. Ketiga, pengembalian NSFP yang tidak digunakan ke KPP sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PER-24/PJ/2012. Keempat, pemberitahuan dan perubahan nama penandatanganan Faktur Pajak ke KPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) PER-24/PJ/2012. Kelima, permintaan copy Faktur Pajak dalam hal Faktur Pajak hilang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PER-24/PJ/2012. Keenam, cetak ulang e-Faktur yang rusak/hilang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PER-16/PJ/2014.

Pokok-Pokok Perubahan

Terdapat beberapa pokok perubahan yang perlu menjadi perhatian PKP. Pertama, pencantuman NIK/nomor paspor pada e-Faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi. Kedua, pengaturan terkait pengisian jenis barang dalam Faktur Pajak. Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa

kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka, sedangkan untuk jenis barang atas penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan minimal diisi alamat lengkap. Ketiga, untuk transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi dengan kurs sesuai KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Untuk Faktur Pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

Keempat, terkait NSFP diatur bahwa NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP. Diatur pula terkait pemberian NSFP berdasarkan jumlah yang diberikan, yaitu: bagi PKP yang mendapat paling banyak 75 NSFP; PKP yang mendapat paling banyak 120 persen dari jumlah Faktur Pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 Masa Pajak sebelumnya; dan PKP yang membutuhkan NSFP jumlah tertentu, yaitu bagi PKP yang baru dikukuhkan, PKP

pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu.

Kelima, penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Keenam, pengaturan kembali penanda tangan e-Faktur, yaitu bahwa pihak yang berhak menandatangani e-Faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-Faktur.

Keenam, diatur bahwa aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* dapat digunakan oleh PKP yang membuat e-Faktur melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ketujuh, aturan terkait pembatasan waktu upload e-Faktur, yaitu e-Faktur harus di-*upload* paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

Kedelapan, pengaturan kembali Faktur Penjualan. Faktur Penjualan merupakan



Kontributor: Paruhum Rora Hutaaruk

e-Faktur sepanjang diunggah menggunakan aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* dan memperoleh persetujuan DJP. Kesembilan, pembubuhan cap/keterangan mengenai fasilitas PPN/PPnBM dilakukan melalui aplikasi e-Faktur. Terakhir, mengenai sengketa pajak yang terkait dengan Pajak Masukan, PKP pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya tidak lengkap sebagaimana yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 karena kesalahan PKP penjual yang terjadi di luar kuasa PKP pembeli.

Dengan adanya perbaikan aturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan Faktur Pajak. Ini akan semakin menguatkan pilar regulasi yang menyangga proses Reformasi Perpajakan dan masih terus berjalan hingga sekarang, untuk Indonesia yang lebih baik.

Perbaiki Kualitas Pengawasan Wajib Pajak

Pelaksanaan Uji Coba Tukar Peran *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Penataan jabatan fungsional merupakan salah satu bagian dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2020 tentang Pedoman Tata Kelola dan Implementasi Renstra

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Agar penataan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat berjalan secara fleksibel, pengembangan kompetensi antar rumpun jabatan fungsional menjadi kebutuhan organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan. Dalam rangka mendukung penataan jabatan fungsional sebagai salah satu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak dan kebutuhan organisasi untuk mengembangkan kompetensi antar rumpun jabatan fungsional tersebut, sekaligus

untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak yang lebih optimal dengan berbasis pola kerja tim, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan Uji Coba Fleksibilitas Kompetensi Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan.

Uji Coba Fleksibilitas Kompetensi Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan dilakukan di 14 (empat belas) Kantor Pelayanan Pajak pada 8 (delapan) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta yang dimulai sejak tanggal 7 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dalam kegiatan ini, pengawasan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan pola kerja tim, di mana 45 orang Fungsional Pemeriksa Pajak menjalankan peran sebagai Ketua Tim Pengawasan dengan beranggotakan 51 *Account Representative* untuk mengawasi lebih kurang 6.091 Wajib Pajak Strategis. Selain itu, dalam kegiatan ini 45 orang *Account Representative* melaksanakan peran sebagai anggota Tim Pemeriksaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada fungsi pengawasan dalam bentuk analisis yang semakin dalam dan berkualitas, meningkatkan fungsi komunikasi antar tim pengawasan, dan menambah pengalaman dan kapasitas pegawai, baik Fungsional

Pemeriksa Pajak maupun *Account Representative*.

Selama masa uji coba berlangsung, Tim Pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang terdiri dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Penelitian Material (PKM). Aktivitas PPM terdiri dari pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan pengawasan pembayaran angsuran pajak. Sementara, aktivitas PKM dilaksanakan dengan menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui penelitian dan analisis komprehensif berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan dan penyelesaian atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) yang telah diterbitkan sebelum periode uji coba berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi atas jumlah penerbitan Laporan Hasil Penelitian (LHPt), SP2DK, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK), jumlah potensi, dan realisasi penerimaan, kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pola kerja tim selama masa uji coba ini telah mencapai hasil yang memuaskan. Sampai dengan bulan April 2022, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan pola kerja tim

mencapai Rp8,5 miliar dengan *success rate* mencapai 9,59 persen, lebih tinggi dibandingkan kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan dengan pola kerja tim.

Pengawasan Wajib Pajak Berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

Dalam rangka optimalisasi pengawasan Wajib Pajak Tahun 2022, kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material Wajib Pajak di tahun ini dilakukan dengan didahului penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP). DPP adalah daftar yang berisi Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas pengawasan kepatuhan material (PKM) oleh KPP di tahun berjalan. DPP disusun dengan tujuan agar kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan melalui proses perencanaan yang terstruktur yang diselaraskan dengan kebijakan dan strategis pengawasan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan berorientasi kepada kualitas pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal, dan dilakukan secara terfokus untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pengawasan serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi.

Penyusunan DPP dilakukan dengan penetapan dan pemutakhiran DPP oleh Komite Kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak.

Penetapan DPP dilakukan pada awal tahun berjalan untuk kegiatan pengawasan triwulan pertama, dan pemutakhiran DPP dilakukan di setiap triwulan dengan menambah jumlah Wajib Pajak beserta masa atau tahun pajak untuk kegiatan pengawasan triwulan II, III, dan IV. Total estimasi potensi dalam DPP minimal dapat memenuhi *target trajectory* penerimaan dari kegiatan PKM dengan memperhatikan aspek kualitas, juga dengan mempertimbangkan *Tax Potential Rate* (TPR) dan *Success Rate* (SR). Selain itu, pemilihan populasi Wajib Pajak dalam DPP disusun selaras dengan kebijakan dan strategi pengawasan nasional, strategi pengawasan Kanwil DJP, dan rencana kegiatan pengawasan KPP, serta termasuk dalam Wajib Pajak yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan *Compliance Risk Management* (CRM) Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan.

Secara rinci, variabel-variabel yang harus dipertimbangkan



Kontributor: Paruhum Rora Hutaaruk

oleh Komite Kepatuhan dalam menentukan Wajib Pajak yang masuk dalam DPP adalah sebagai berikut:

Daftar Sasaran Analisis Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA);

Data pemicu dan data lainnya hasil dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);

Wajib Pajak *High Wealth Individuals* dan Wajib Pajak Grup;

CRM fungsi *Transfer Pricing*, dengan memprioritaskan kepada Wajib Pajak yang

memiliki risiko *Transfer Pricing intra-group services, intellectual property, intra-group loans*, dan transaksi penjualan/pembelian barang berwujud sektor komoditas;

Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) dan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB);

Prioritas terhadap Wajib Pajak dengan kemampuan bayar (*Ability to Pay*) yang tinggi dan sangat tinggi;

Wajib Pajak yang sedang atau sudah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan agar tidak dimasukkan dalam DPP;

Tidak termasuk Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan mempertimbangkan Tahun Pajak yang mendapatkan fasilitas;

Dilakukan *mirroring* terhadap hasil pemeriksaan, keberatan, banding, dan gugatan yang disetujui oleh Wajib Pajak dan/atau dimenangkan oleh DJP;

Wajib Pajak memiliki data dengan estimasi potensi pajak yang signifikan dan/atau mendekati daluwarsa penetapan pajak.

Bea Cukai Bersinergi Dengan Instansi Lainnya, Di Bandara Juanda Gagalkan Penyelundupan 30.911 Benih Lobster Dan Di Tarakan Bongkar Dua Kasus Penyelundupan Narkotika

Bea Cukai Juanda bersinergi dengan Satgaspam Lanudal Juanda, Pomal Lanudal Juanda, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, BKIPM Surabaya I, PT Angkasa Pura I (Persero), serta Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya dalam menggagalkan upaya penyelundupan 30.911 ekor benih bening lobster (BBL) tujuan Singapura melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Juanda.

Penggagalan upaya penyelundupan berawal dari informasi intelijen, yaitu akan ada pengiriman BBL yang berangkat dari Surabaya tujuan Singapura pada tanggal 12 Mei 2022 melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Juanda. Petugas mencurigai penumpang berinisial ST dengan barang bawaan berupa koper dan tas ransel yang menjadi target operasi penyelundupan Baby Lobster. Penumpang tersebut merupakan penumpang pesawat *Scoot Air* TR263 tujuan Surabaya-Singapura.

Selanjutnya petugas melaksanakan pemeriksaan bersama atas barang tersebut dan mendapatkan 41 kantong BBL, dengan rincian sebanyak 23 kantong disembunyikan di dalam koper dan 18 kantong disembunyikan di dalam tas ransel, tanpa disertai dokumen resmi. Guna memastikan jumlah dan jenis dari BBL tersebut, Bea Cukai menggelar pemeriksaan dan pencacahan bersama dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I, dan mendapatkan BBL dengan jumlah total keseluruhan 30.911 ekor.

Kegiatan pengiriman BBL ini diduga melanggar pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Atas barang bukti berupa BBL telah diserahkan ke BKIPM Surabaya I untuk ditangani lebih lanjut.

Tindak lanjut penanganannya, dengan melakukan penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya. Bea cukai akan terus melaporkan perkembangan pemberkasannya dan akan mengajukannya ke

Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan persetujuan pemberkasannya penyidikannya dan apabila sudah P21 akan dibawa ke Pengadilan.

Sinergi juga terjalin yang terjalin antara Bea Cukai Tarakan dan BNNP Kalimantan Utara, yang berbuah manis dengan berhasil dibongkarnya dua kasus penyelundupan narkotika di Kota Tarakan. Penindakan narkotika ini bermula dari diterimanya informasi dari masyarakat atas adanya peredaran gelap narkotika di daerah Juwata Laut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas mengamankan sebuah paket yang terbungkus plastik bening berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.014 gram dan satu bungkus plastik bening lainnya yang juga berisikan sabu dengan berat bruto delapan gram. Paket tersebut diamankan petugas di Jalan P. Aji Iskandar, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan.

Tak berhenti di sana, petugas kembali melaksanakan penindakan narkotika kedua di Jalan Ahmad Yani, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada penindakan kedua,

petugas mengamankan barang bukti berupa 22 bungkus plastik bening bertuliskan very good yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22.298,67 gram, sebuah plastik bening berisi pil warna merah muda bertuliskan 7A yang diduga narkotika jenis ekstaksi, dan sebuah plastik bening berisi pil kuning yang diduga narkotika jenis ekstaksi sejumlah 94 butir.

Penindakan kedua ini pun dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat atas adanya peredaran gelap narkotika yang akan dibawa ke Berau. Keberhasilan kegagalan penyelundupan narkotika ini tidak lepas dari hasil kerja sama dan sinergi yang telah dibangun Bea Cukai Tarakan dengan BNNP Kalimantan Utara. Penindakan ini adalah bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba. Bea Cukai juga akan terus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan.

Pembiayaan APBN Turut Mendukung Kelancaran dan Kemeriahan Mudik Lebaran 2022

Tahun 2022 dapat dikatakan istimewa. Pemerintah secara resmi memperbolehkan mudik lebaran setelah pembatasan selama 2 tahun berturut-turut akibat pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terus mengalami penurunan hingga menjelang momen Idul Fitri 1443 H. Semua orang menyambut dengan sukacita, masyarakat bereuforia karena telah lama menabung

kerinduan untuk menjalin kembali silaturahmi yang tertunda karena pandemi. Pemerintah tak lepas tangan, berbagai kebijakan mudik lebaran diatur sedemikian rupa guna memperlancar arus mudik dan mengantarkan masyarakat kembali ke kampung halamannya.

Kesiapan infrastruktur salah satunya berupa jalan tol menjadi kunci konektivitas antar wilayah, dan sangat berpengaruh bagi kelancaran arus mudik. Pembiayaan



Foto Humas PT. Jasa Marga

tetap berperan penting dalam mendukung kesiapan infrastruktur tersebut, terlebih mengingat kapasitas APBN yang masih terbatas. Berikut beberapa infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pembiayaan lainnya.

1. *Underpass New Yogyakarta Internasional Airport (YIA)*

Underpass terpanjang yaitu 1,3 km dibiayai oleh SBSN dengan total nilai investasi Rp306 miliar. Pembangunan underpass ditujukan untuk menunjang lalu lintas kendaraan menuju dan dari Bandara YIA, membuka jalan nasional pantai selatan Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

2. Tol Trans Sumatera

Meliputi jalan tol di Sumatera dari Bakauheni, Lampung, hingga Kayu Agung – Sumatera Selatan dengan panjang 330 km. Pembangunan tol ini mendapat dukungan penjaminan Pemerintah kepada BUMN senilai Rp34,46 T serta dukungan pemerintah lainnya. Jalan tol ini dapat menghemat waktu tempuh hingga 7 jam perjalanan.

3. Tol Medan-Kualanamu

Masih di Sumatera, peran pembiayaan APBN diwujudkan dalam pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Jalan tol ini dibangun dengan tujuan utama untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan serta penyerapan perekonomian di daerah Sumatera Utara.

4. Jalan Lot 1 Tambakreja – Bantarsari

Dibangun melalui pembiayaan pinjaman luar negeri dari IsDB di kab. Cilacap Jawa Tengah dengan total nilai investasi Rp91,95 miliar.

5. Tol Cisumdawu-Jawa Barat *blended financing* pinjaman dan kpbu

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) merupakan jalan tol yang menghubungkan jalan Tol Purbaleunyi dengan jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali). Pembangunan jalan tol ini dibiayai oleh skema *blended financing* dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman luar negeri. Keberadaan tol ini mampu memperlancar arus lalu lintas kendaraan dari Bandung yang menuju Utara Jawa seperti Bandara Kertajati di Majalengka. Selain itu, Tol Cisumdawu juga menjadi kunci utama pengembangan kawasan “segitiga emas” Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

6. Tol Manado-Bitung

Infrastruktur lainnya yang dibiayai *blended financing* KPBU dan pinjaman luar negeri adalah Jalan Tol Manado-Bitung dengan total nilai investasi Rp 4,95 Triliun. Jalan Tol Manado – Bitung dibangun guna mendukung mobilitas kendaraan niaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Manado - Bitung - Likupang. Adanya jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Manado menuju Bitung sehingga waktu yang dibutuhkan

cukup 35 menit saja dari yang semula mencapai 1,5-2 jam perjalanan.

7. Jalur Kereta Api dari SBSN

Data dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, jumlah penumpang kereta api selama periode lebaran (22 April-13 Mei 2022) mencapai sekitar 4,39 juta penumpang, terdiri dari 2,55 juta pelanggan kereta api (KA) jarak jauh dan 1,83 juta pelanggan kereta api lokal. SBSN berperan penting dalam membangun konektivitas melalui pembangunan stasiun dan jalur perkeretaapian, antara lain di wilayah pulau Jawa berupa pembangunan *double-double track* jalur KA Manggarai-Bekasi, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai s.d. Cikarang, jalur ganda KA Cirebon-Kroya, jalur ganda KA Kroya-Kutoarjo, jalur ganda KA Mojokerto-Jombang, serta pembangunan elektrifikasi jalur KA Yogyakarta-Solo. Selain itu, terdapat pula pembangunan jalur KA Rantau Prapat-Kota Pinang dan jalur KA Besitang-Langsa di Sumatera serta jalur KA Makassar-Parepare di Sulawesi.

Keberadaan infrastruktur yang dibangun Pemerintah sebagai manfaat dari pembiayaan tentunya diharapkan juga akan mendukung percepatan pembangunan daerah kedepannya karena telah terbentuknya sarana konektivitas yang mumpuni. Masukan atau testimoni dari masyarakat yang sudah memanfaatkan sarana infrastruktur di atas sangat diharapkan Pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah di masa datang.

Rangkaian Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2022

Indonesia kembali menghadiri rangkaian Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2022 di Washington, D.C., Amerika Serikat pada bulan April lalu. Rangkaian pertemuan ini merupakan forum multilateral yang dihadiri oleh para Menteri keuangan dan pembangunan, para gubernur bank sentral, eksekutif sektor swasta, perwakilan organisasi masyarakat, serta akademisi

untuk membahas kepentingan global, termasuk perekonomian, pengentasan kemiskinan, ekonomi pembangunan, dan efektivitas bantuan. Dalam rangkaian pertemuan ini, terdapat berbagai pertemuan penting seperti Pertemuan Kedua Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG Kedua) di mana Indonesia memegang Presidensi dan Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim (Koalisi) di mana Indonesia bertindak sebagai *co-chair* bersama Finlandia. Selain itu, terdapat banyak seminar,

forum multilateral, pertemuan bilateral, serta berbagai forum lainnya.

Pertemuan Koalisi membahas dua topik utama, yaitu pengelolaan kebijakan iklim di tengah keterbatasan fiskal dan volatilitas energi serta pendekatan multilateral untuk harga karbon. Diskusi dalam pertemuan ini fokus pada tantangan kebijakan iklim saat ini, berbagai pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan peran nilai ekonomi karbon – termasuk pendekatan multilateral pada nilai ekonomi karbon dan berbagai penerapan pajak karbon dan skema perdagangan emisi (*emission trading scheme/ETS*) – dari pengalaman negara-negara yang melaksanakan kombinasi kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Diskusi dalam FMCBG

Kedua merupakan lanjutan pembahasan agenda pada pertemuan sebelumnya pada Februari 2022 di Jakarta, dengan fokus pada empat agenda utama, yakni 1) ekonomi global dan risikonya; 2) isu kesehatan global; 3) arsitektur keuangan internasional; dan 4) keuangan berkelanjutan. Peran G20

sebagai forum kerja sama ekonomi internasional untuk mengatasi tantangan ekonomi dunia yang kompleks sangat krusial. Oleh karena itu, G20 mendukung langkah penyesuaian agenda yang tengah berjalan guna menanggulangi dampak ekonomi dari perang, sambil tetap menjaga komitmen untuk mencari solusi bagi tantangan global yang telah berlangsung lama agar dunia pulih kembali dengan kuat secara berkelanjutan, inklusif, dengan pertumbuhan yang seimbang.



**Berkah
Ramadhan,
Penerimaan Pajak
Tumbuh 51,49
Persen (yoy)**

Penerimaan Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan April 2022 mencapai 51,49 persen (*yoy*). Tingginya laju pertumbuhan tersebut mendorong penerimaan pajak terealisasi mencapai Rp567,69 triliun. Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil mengumpulkan 44,88 persen dari penerimaan pajak yang ditargetkan dalam APBN 2022. Kinerja yang impresif ini, membangkitkan optimisme akan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, optimisme tersebut

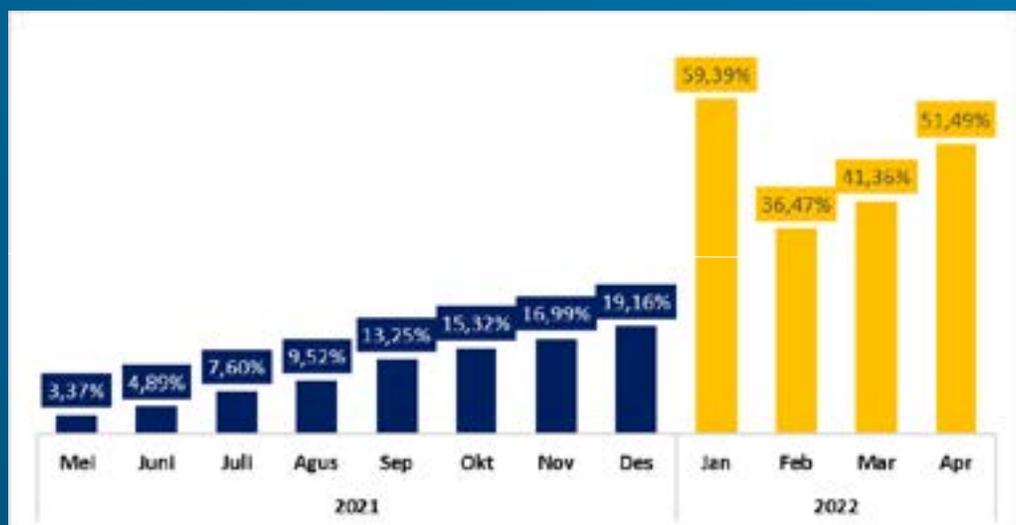
juga didukung oleh realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2022 yang menggembirakan. Pada triwulan pertama tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen (*yoy*)¹ dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun.

Sampai dengan April 2022, hampir seluruh kelompok pajak mempertahankan kinerja impresifnya. PPh Non Migas dan PPh Migas tumbuh hingga 58,39 persen (*yoy*) dan 79,53

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 April 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	680,88	373,14	59,93	54,80
- Non Migas	633,56	342,48	58,39	54,06
- Migas	47,31	30,66	79,53	64,80
PPN & PPhBM	554,38	192,12	39,68	34,65
PBB	18,36	0,40	-13,80	2,20
Pajak Lainnya	11,38	2,02	-40,71	17,79
Jumlah	1.265,00	567,69	51,49	44,88

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



persen (*yoy*) secara berturut-turut. Sedangkan pajak atas konsumsi yang meliputi PPN dan PPhBM secara akumulatif tumbuh sebesar 39,68 persen (*yoy*), sehingga dapat membukukan realisasi nominal mencapai Rp192,12 triliun. Di sisi lain, kelompok pajak PBB dan Pajak Lainnya mengalami perlambatan pada periode ini.

Faktor Utama Penentu Capaian Penerimaan Pajak Bulan April

Bila dicermati, baiknya penerimaan pajak pada bulan April utamanya disebabkan oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, pertumbuhan PPh Tahunan (PPh Badan dan PPh Migas) yang sangat tinggi akibat kenaikan harga komoditas. Pada bulan April 2022, penerimaan PPh Tahunan mencapai Rp118,8 triliun dan tumbuh mencapai 90,81 persen (*yoy*). Penerimaan bulan April tahun ini merupakan penerimaan bulan April dengan kinerja pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Selanjutnya, faktor kedua penentu capaian penerimaan pajak pada bulan April adalah momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Jatuhnya Ramadhan pada bulan April dan Hari Raya Idul Fitri 1433 H pada bulan Mei menyebabkan terjadinya pergeseran sebagian pembayaran Tunjangan

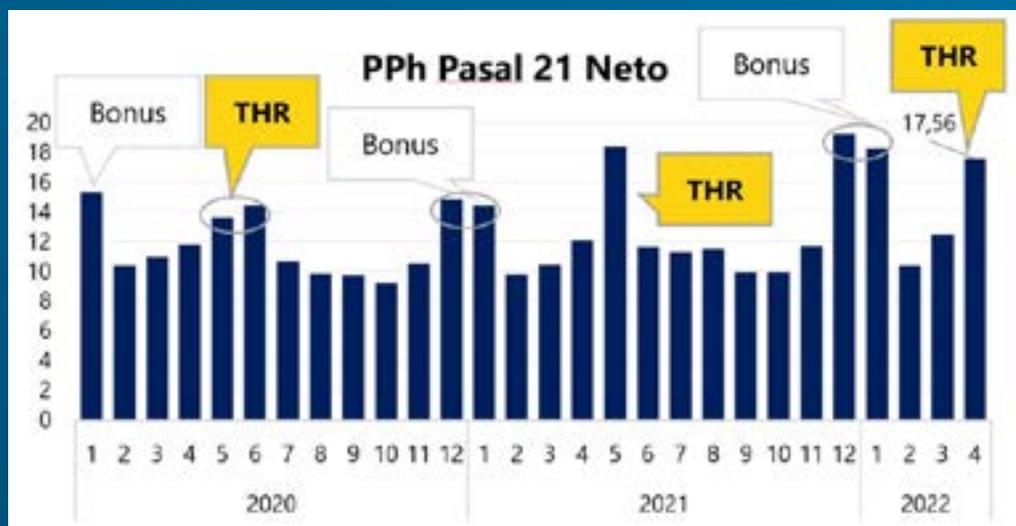
Hari Raya (THR). Pada tahun sebelumnya (2021), penerimaan PPh Pasal 21 atas pembayaran THR terealisasi pada bulan Mei. Sedangkan pada tahun ini, penerimaan PPh Pasal 21 atas pembayaran THR terealisasi di bulan April 2022. Akibat pergeseran tersebut, penerimaan neto bulanan pada periode April 2022 mengalami kenaikan dengan realisasi mencapai Rp17,56 triliun. Selain itu, meningkatnya transaksi domestik dan impor dalam bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 H mendongkrak realisasi penerimaan Bruto PPN Dalam Negeri pada April 2022. Pada bulan April 2022, penerimaan Bruto PPN Dalam Negeri mencapai Rp48,79 triliun. Realisasi tersebut merupakan realisasi bulan April tertinggi sejak tahun 2018.

Faktor ketiga adalah mulai berakhirnya (*phasing-out*) beberapa insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pengetatan terhadap insentif fiskal tersebut dan basis perhitungan pertumbuhan yang masih rendah pada tahun sebelumnya, berdampak pada tingginya pertumbuhan pada bulan April 2022. Selain itu, penerimaan pajak pada periode ini juga didukung oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak awal tahun 2022.

Pertumbuhan Tahunan PPh Badan dan PPh Migas



Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Neto tahun 2020 sampai dengan 2022



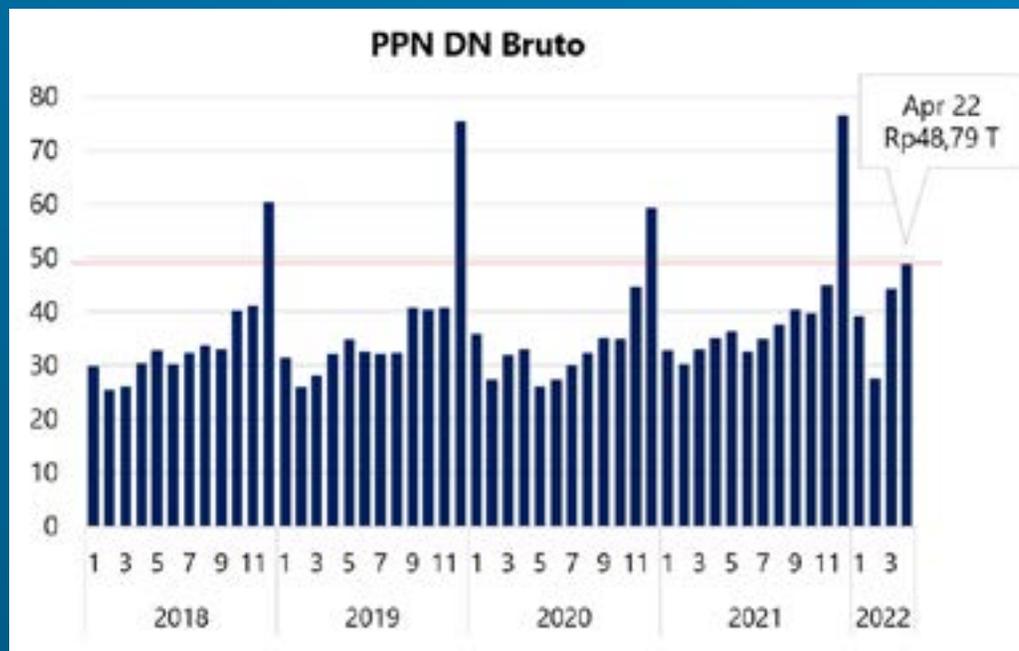
Pertumbuhan Penerimaan Neto Seluruh Jenis Pajak Dominan Positif

Secara kumulatif, penerimaan seluruh jenis pajak utama periode sampai dengan April 2022 mengalami pertumbuhan positif. Baiknya kinerja tersebut didorong oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi dan adanya kenaikan harga komoditas. Pajak atas konsumsi, yaitu PPN Dalam Negeri (PPN DN) mencatatkan pertumbuhan *double digits* sebesar 36,59 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang bulan Suci Ramadhan dan menjelang kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang berlaku mulai 1 April 2022. Sejalan dengan pajak atas konsumsi, penerimaan pajak atas impor juga menggembirakan. Secara keseluruhan, pajak atas impor tumbuh 58,17 persen (yoy). Jika dilihat secara detail, pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor pada periode ini mencapai 172,82 persen (yoy) sejalan dengan kinerja PPN Impor yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 40,22 persen (yoy). Mengikuti pergerakan pajak dalam rangka impor lainnya, PPnBM Impor juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 33,54 persen (yoy).

Selanjutnya, PPh Badan mencatatkan pertumbuhan signifikan 105,29 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp166,60 triliun. Realisasi PPh Badan tahun ini melonjak dua kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp81,15 triliun. Jenis pajak PPh Pasal 26 juga tumbuh impresif mencapai 32,58 persen (yoy). Sedangkan jenis pajak lainnya yaitu PPh Final tumbuh 6,32 persen (yoy), dampak dari pemberlakuan PPS.

Secara bulanan, kinerja pertumbuhan positif seluruh jenis pajak dominan senada dengan pertumbuhan kumulatifnya. Kinerja pertumbuhan PPN DN mencapai 59,39 persen (yoy). Sejalan dengan kinerja PPN DN yang memuaskan, kinerja penerimaan pajak atas impor yang meliputi PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yang mencapai 350,69 persen (yoy) dan 36,17 persen (yoy) secara berturut-turut. Hal yang sama juga terlihat pada kinerja penerimaan PPnBM Impor. Penerimaan PPnBM Impor juga mengalami pertumbuhan yang tinggi mencapai 79,58 persen (yoy). Selanjutnya, jenis pajak lainnya seperti PPh Final dan PPh Pasal 26 juga menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan mencatatkan laju

Perkembangan Penerimaan PPN Bruto tahun 2018 sampai dengan 2022



Penerimaan Pajak-pajak Utama



pertumbuhan hingga *double digits*.

Penerimaan Neto Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif

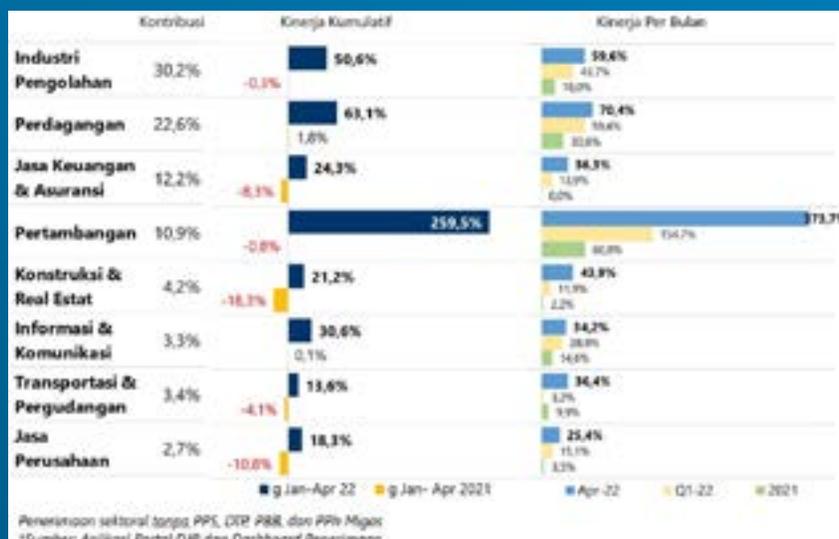
Penerimaan pajak pada seluruh sektor utama mencatatkan pertumbuhan positif. Kinerja yang memuaskan ini ditopang oleh kenaikan PPh Badan akibat peningkatan profitabilitas korporasi pada tahun 2021. Peningkatan profitabilitas tersebut utamanya disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi secara umum dan lonjakan harga komoditas sektor tertentu pada Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Industri Pengolahan. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi bulan Maret (PPN DN dan pajak transaksional lainnya ada *lag* 1 bulan) dan impor bulan April (PDRl *real-time*) juga meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Sektor Pertambangan menjadi *top performer* dengan capaian pertumbuhan kumulatif 259,47 persen (*yoy*). Kenaikan penerimaan pada Sektor Pertambangan utamanya berasal dari kenaikan pada Subsektor Pertambangan Batubara dan Lignit. Berdasarkan sumber dari Kementerian ESDM, Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode April tahun 2022 menunjukkan tren yang positif.

Pada bulan April 2022, HBA melonjak sangat tinggi dengan harga USD 288,40 per ton, (diatas rata-rata HBA tahun 2021) atau tumbuh mencapai 53,09 persen (*mtm*).

Selanjutnya, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri Pengolahan mengikuti kinerja yang baik dari Sektor Pertambangan dengan tumbuh tinggi mencapai 63,12 persen (*yoy*) dan 50,60 persen (*yoy*) secara berturut-turut. Pertumbuhan pada Sektor Perdagangan utamanya merupakan kontribusi dari Subsektor Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor dengan realisasi penerimaan mencapai Rp34,18 triliun. Sedangkan dari Sektor Industri Pengolahan, subsektor utama yang berkontribusi sangat besar adalah Industri Makanan dengan realisasi penerimaan mencapai Rp16,36 triliun. Selain sektor utama yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sektor usaha lain yang juga mengalami kinerja yang impresif seperti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan Real Estate, dan Sektor Informasi dan Komunikasi yang mampu tumbuh memuaskan dengan laju pertumbuhan mencapai 24,34 persen (*yoy*), 21,21 persen (*yoy*), dan 30,62 persen (*yoy*) secara berturut-turut.

Penerimaan Pajak Sektoral



Kinerja Penerimaan Sektoral Sektor Komoditas dan Non Komoditas

(dalam triliun rupiah)

Sektor & Subsektor		Realisasi Jan-Apr		Kenaikan	
		2021	2022	Nominal	%
Sektor yang langsung terpengaruh harga komoditas		45,45	122,06	76,61	168,56%
Pertanian	Perkebunan Kelapa Sawit	4,14	9,96	5,81	140,25%
Pertambangan	Pertambangan Batu Bara	7,45	35,64	28,18	377,76%
Pertambangan	Pertambangan Minyak Bumi	4,01	4,77	0,76	18,92%
Pertambangan	Pertambangan Gas Alam	15,48	27,70	12,22	78,93%
Pertambangan	Pertambangan Bijih Tembaga	3,05	11,81	8,76	286,94%
Pertambangan	Pertambangan Bijih Nikel	0,72	2,07	1,35	188,39%
Pertambangan	Pertambangan Emas Dan Perak	0,74	1,33	0,59	79,66%
Pertambangan	Jasa Pertambangan	2,37	5,20	2,83	119,60%
Industri Pengolahan	Industri Minyak Kelapa Sawit	1,48	11,61	10,13	685,36%
Industri Pengolahan	Industri Besi dan Baja	6,00	11,97	5,98	99,67%
Sektor yang tidak langsung terpengaruh harga komoditas (melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi)		332,40	459,66	127,26	38,29%
Pertanian, Perikanan, Kehutanan (selain sawit)		1,88	2,63	0,75	39,87%
Pertambangan Lainnya		-	0,14	1,40	1079,79%
Industri selain sawit dan besi/baja		97,40	133,74	36,34	37,31%
Perdagangan		74,83	123,98	49,15	65,69%
Jasa Keuangan		53,01	65,93	12,92	24,38%
Konstruksi & Real Estat		18,60	22,61	4,01	21,57%
Transportasi & Pergudangan		16,35	18,62	2,27	13,91%
Informasi dan Komunikasi		13,48	17,64	4,16	30,84%
Jasa Perusahaan		12,54	15,00	2,46	19,61%
Sektor Lainnya		44,46	58,10	13,64	30,68%
TOTAL		377,85	581,72	203,87	53,96%

Sektor Komoditas Mengalami Kinerja Penerimaan Lebih Tinggi

Adanya tren kenaikan dan bertahannya harga komoditas pada tingkat harga yang tinggi, membawa keuntungan tersendiri bagi sektor-sektor usaha komoditas. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja pertumbuhan penerimaan pajak antara sektor komoditas dan non-komoditas. Jika kinerja kedua kelompok sektor tersebut dibandingkan, terlihat bahwa kinerja penerimaan pajak pada sektor komoditas jauh lebih baik dibandingkan sektor non-komoditas. Sektor komoditas mampu tumbuh sangat tinggi mencapai 168,56 persen (yoy) jauh lebih tinggi dari sektor non-komoditas yang hanya dapat tumbuh baik sebesar 38,29 persen (yoy). Jenis pajak utama yang menjadi penopang utama dari kinerja sektor komoditas ini adalah PPh Badan. Jenis pajak tersebut, berkontribusi sebesar 30,23 persen dan mencatatkan pertumbuhan hingga 111,59 persen (yoy).

Jika dilihat lebih dalam lagi, Subsektor komoditas dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh Industri Minyak Kelapa Sawit yang mencatatkan pertumbuhan mencapai 685,36 persen (yoy). Selain

itu, performa terbaik juga dialami oleh Subsektor Pertambangan Batubara yang tumbuh mencapai 377,76 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp35,64 triliun pada periode sampai dengan April 2022. Sementara itu, Subsektor Pertambangan Bijih Tembaga, Pertambangan Bijih Nikel, Perkebunan Kelapa Sawit, dan Jasa Pertambangan juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada periode sampai dengan April 2022, ketiga sektor tersebut mampu tumbuh dengan laju pertumbuhan di atas seratus persen.

Perkembangan Penerimaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Realisasi penerimaan PPS pada bulan April 2022 sedikit melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada periode ini, total PPh yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,90 triliun. Realisasi tersebut mengalami perlambatan dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2022. Secara keseluruhan, penerimaan PPh Final dari PPS yang telah berhasil dikumpulkan mencapai Rp8,40 triliun.

Tren Penerimaan PPS Per Bulan



Statistik Program Pengungkapan Sukarela (PPS)



Realisasi penerimaan PPS tersebut berasal dari 49.367 Wajib Pajak yang telah mengikuti PPS dan menyampaikan Surat Keterangan melalui kanal PPS (data per 12 Mei 2022). Penerimaan yang terhimpun merupakan setoran atas pengungkapan Nilai Harta Bersih di Dalam Negeri dan Harta Bersih yang di repatriasi dengan jumlah gabungan mencapai Rp70,71 triliun. Sedangkan pengungkapan harta dalam bentuk investasi mencapai Rp4,86 triliun dan Pengungkapan Harta bersih di Luar Negeri mencapai Rp6,60 triliun.

Dari harta yang telah diungkap tersebut, terdapat harta yang ditempatkan dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Nominal harta dari PPS yang ditempatkan dalam SBN sebesar Rp46,35 miliar, USD650 ribu dalam bentuk Surat Utang Negara, dan Rp25,66 miliar dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara.

**Neraca Perdagangan
Nasional Bulan April
2022 ini Tercatat
Surplus USD7,56 Miliar
atau USD16,89 Miliar
Sepanjang Periode
Januari hingga April
2022**

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan April 2022 tercatat surplus USD7,56 miliar atau menjadi surplus NP tertinggi hingga saat ini (*all time high*). Kinerja ini sekaligus melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu pada bulan Mei 2020. Surplus NP didorong kinerja positif neraca nonmigas yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, namun demikian neraca migas mengalami tekanan yang semakin dalam. Adapun aktivitas ekspor dan impor bulan April 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu.

Surplus NP dikontribusi oleh neraca nonmigas, didorong peningkatan volume ekspor serta harga komoditas yang masih tinggi. Kinerja neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, bijih tembaga dan produk kelapa sawit. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa besi baja dasar dan pakaian jadi.

Kinerja ekspor bulan April 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan April 2021, meningkat signifikan sebesar 47,76 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi peningkatan harga komoditas global yang masih tinggi dan dibukanya kembali

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y. %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	35.16	11.49	15.31	0.13%	33.20%	43.54%
2	CUKAI	203.92	60.05	78.56	32.77%	30.82%	38.53%
	Hasil Tembakau	193.53	58.25	76.29	34.42%	30.98%	39.42%
	Ethil Alkohol	0.19	0.03	0.04	-77.42%	35.48%	23.63%
	MMEA	6.80	1.74	2.19	0.54%	25.90%	32.15%
	Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.03	19.66%	21.79%	-
	Cukai Lainnya	-	0.02	0.01	109.93%	-23.45%	-
	Plastik & MDDK	3.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	BEA KELUAR	5.92	7.18	14.51	658.89%	102.05%	245.23%
	TOTAL	245.00	78.73	108.38	36.55%	37.66%	44.24%
	PPN Impor		55.89	78.38	8.73%	40.22%	
	PPn BM Impor		0.99	1.32	-27.10%	33.54%	
	PPH Pasal 22 Impor		8.96	24.45	-44.70%	172.82%	
	Total PDRI lainnya		65.84	104.14	-4.53%	58.17%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		144.57	212.52	14.18%	47.00%	

Sumber: DiPB 9 Mei 2022

(dalam Triliun Rupiah)

ekspor batubara. Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan besi baja dasar, yang masing-masing tumbuh 184,33 persen dan 73,97 persen (*yoy*). Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, ekspor meningkat 3,11 persen (*mtm*), terutama dari dampak naiknya harga.

Dari sisi ekspor nonmigas, bulan April 2022 tumbuh 47,69 persen (*yoy*). Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif ini terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Begitu juga dengan sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 48,93 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekspor migas didorong meningkatnya ekspor gas alam maupun buatan ke Singapura dan Jepang. Selain itu, minyak bakar juga diekspor ke Singapura dan Malaysia.

Pada bulan April ini kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 21,97 persen (*yoy*). Namun apabila dibandingkan dengan bulan lalu, impor melambat -10,0 persen (*mtm*) sebagai dampak penurunan impor nonmigas. Dibandingkan tahun lalu, tumbuhnya kinerja impor didorong oleh tingginya harga, baik sektor migas maupun nonmigas. Kinerja impor migas tumbuh 88,49 persen (*yoy*)

terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per April 2022 masih mengalami kenaikan (*yoy*) akibat gangguan pasokan energi global dari keberlanjutan konflik Rusia dan Ukraina. Permintaan bahan bakar dalam negeri meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan peningkatan stok BBM menjelang lebaran.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 12,47 persen (*yoy*) didorong pertumbuhan komoditas berupa komponen elektronik, mesin penambangan, dan besi baja dasar. Hal ini juga menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi terutama industri nasional yang mendorong impor bahan baku pendukung dan barang modal kebutuhan industri.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 30 April 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp108,38 triliun atau 44,24 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan tumbuh 37,66 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh

komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 30 April 2022 mencapai Rp104,14 triliun atau tumbuh 58,17 persen (*yoy*). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp212,52 triliun atau tumbuh sebesar 47,00 persen (*yoy*).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan April 2022 sebesar Rp15,31 triliun atau 43,54 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 33,20 persen bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan positif yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 30 April 2022 mencapai Rp78,56 triliun atau 38,53 persen dari targetnya, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 30,82 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas

kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, dan peningkatan produksi. Penerimaan Cukai, yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir April 2022 tumbuh 30,98 persen (*yoy*), mencapai Rp76,29 triliun atau 39,42 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh dampak kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 30 April 2022 masih tumbuh *double digits*, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 25,90 persen (*yoy*) atau mencapai Rp2,19 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi

oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 99,0 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Maret 2022 masih mengalami pertumbuhan 35,48 persen (yoy), atau sebesar Rp44,89 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA kembali ke pola normal. Sebelum terjadi pandemi atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 30 April 2022 tumbuh signifikan 102,05 persen (yoy),

didorong tingginya harga komoditas terutama tembaga dan *crude palm oil* (CPO). Penerimaan BK mencapai Rp14,51 triliun atau 245,23 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 162,17 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga. Penerimaan BK CPO & turunannya tumbuh 90,22 persen (yoy), didukung tarif BK maksimal dan pengenaan BK pada produk turunannya.



**Pendapatan
SDA Menjadi
Lokomotif
Pendorong
PNBP**

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tren positif pendapatan negara masih berlanjut hingga bulan April 2022.

Dinamisasi ekonomi global dampak konflik Rusia-Ukraina dan supply disruption menyebabkan semakin tinggi harga komoditas di pasaran (terutama komoditas energi). Kondisi ini mendorong penerimaan negara dari Pajak, Bea Cukai, dan PNBP meningkat secara signifikan.

Realisasi PNBP sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp177,37 triliun atau mencapai 52,86 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022.

Capaian ini tumbuh 35,04 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 14,93 persen. Kontribusi dari SDA yang tumbuh signifikan pada sampai dengan bulan April 2022 mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp74,44 triliun atau 61,04 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp49,43 triliun serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2022	Realisasi s.d. April 2022	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	335.555,61	177.367,41	52,86	35,04
A Pendapatan SDA	121.950,11	74.438,98	61,04	122,42
1 Migas	85.900,62	49.433,77	57,55	129,42
2 Non Migas	36.049,49	25.005,21	69,36	109,76
a Pendapatan Pertambangan Minerba	28.011,27	22.747,01	81,21	125,56
b Pendapatan Kehutanan	4.856,96	1.519,28	31,28	8,13
c Pendapatan Perikanan	1.627,80	467,97	28,75	135,36
d Pendapatan Panas Bumi	1.553,46	270,96	17,44	16,75
B Pendapatan KND	37.000,00	25.100,03	67,84	77,33
C Pendapatan PNBP Lainnya	97.807,95	57.597,48	58,89	10,91
D Pendapatan BLU	78.797,56	20.230,92	25,67	(36,36)

Realisasi Pendapatan SDA



Bumi (Nonmigas) sebesar Rp25,01 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 April 2022 tumbuh sebesar 122,42 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang berkontraksi 20,66 persen (yoy). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Harga komoditas global terus meningkat khususnya pada komoditas energi. Dampak konflik Rusia dengan Ukraina seiring terbatasnya pasokan dari negara penghasil menyebabkan harga batubara mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Demikian pula, harga minyak mentah juga turut melesat akibat kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari Rusia (selaku produsen minyak terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua dunia).

Meningkatnya Pendapatan SDA sampai dengan 30 April 2022 ini juga jauh melampaui Penerimaan SDA periode sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 (sebesar Rp45,69 triliun atau tumbuh 62,91 persen). Kenaikan terbesar disumbang dari Pendapatan SDA Nonmigas yang tumbuh 129,76 persen (tahun 2019 menghasilkan penerimaan sebesar Rp10,88 triliun dan

tahun 2022 sebesar Rp25,01 triliun). Adapun Pendapatan SDA Migas tumbuh 42,01 persen (semula tahun 2019 sebesar Rp34,81 triliun menjadi Rp49,43 triliun tahun 2022).

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 30 April 2022 sebesar Rp49,43 triliun atau mencapai 57,55 persen dari target APBN 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 129,42 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang berkontraksi 35,67 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan April 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan Maret 2022 sebesar USD113,5 yang penerimaannya diterima pada bulan April 2022. Rata-rata ICP bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 sebesar USD92,12 per barel atau naik 63,90 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya harga minyak mentah utama di pasar internasional selain disebabkan terganggunya pasokan minyak mentah global seiring terjadinya konflik Rusia-Ukraina, juga disebabkan adanya potensi pengenaan sanksi negara-negara "Barat" atas ekspor minyak mentah Rusia yang akan menambah defisit pasokan minyak mentah global di saat permintaan minyak mentah global mulai mengalami peningkatan, serta

adanya kegagalan infrastruktur produksi di negara-negara penghasil minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah mampu menutupi penurunan lifting minyak bumi. Rata-rata lifting minyak bumi bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 sebesar 633,45 ribu barel per hari atau turun 8,56 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 30 April 2022 mencapai Rp25,01 triliun atau 69,36 persen dari target APBN 2022. Capaian ini tumbuh sebesar 109,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 37,18 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 125,56 persen, lebih besar dibandingkan dengan periode bulan Maret 2021 yang juga tumbuh sebesar 40,38 persen. Peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 sebesar USD209,7 per ton yang mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD83,7 per ton). Selain itu,

pendapatan di luar batubara pada bulan April 2022 juga menunjukkan peningkatan. Royalti nikel, timah, dan tembaga meningkat signifikan dampak kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA) ketiga mineral tersebut di pasaran.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 30 April 2022 mencapai Rp1,52 triliun atau 31,28 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8,13 persen (yoy). Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan antara lain disebabkan adanya peningkatan realisasi produksi kayu hutan alam dari sebesar 6.687.157 m³ per 30 April 2021 menjadi sebesar 7.290.599 m³ per 30 April 2022. Meskipun secara totalitas produksi kayu mengalami penurunan dari sebesar 17.722.040 m³ per 30 April 2021 menjadi sebesar 17.706.806 m³ per 30 April 2022, namun realisasi mengalami peningkatan disebabkan jenis kayu dari hutan alam memiliki tarif lebih tinggi dari hutan tanaman. Di samping itu, pembayaran piutang PNBK Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp164,17 miliar juga turut menyumbang peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 30 April 2022 mencapai Rp467,97 miliar atau 28,75 persen dari target APBN TA 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 135,36 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Demikian pula, kenaikan jumlah izin yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut menyumbang signifikan kenaikan PNBP pada bulan April 2022. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/SIKPI) meningkat menjadi 1.008 izin (tahun 2021 sebesar 406 izin). Sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga meningkat menjadi 2.046 izin (tahun 2021 sebesar 1.469 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp270,96

miliar atau 17,44 persen dari target APBN 2022. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 16,75 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp25,10 triliun. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 77,33 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya capaian Pendapatan KND hingga bulan April 2022 disebabkan sudah adanya setoran dividen yang berasal dari BUMN Perbankan sebesar Rp24,58 triliun (untuk tahun buku 2021) atau tumbuh 80,94 persen. Terdapat kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan sebesar Rp10,99 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2021 sebesar Rp13,58 triliun).

Realisasi Pendapatan PNBPLainnya hingga 30 April 2022 mencapai Rp57,60 triliun atau 58,89 persen dari target APBN 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,91 persen (yoy). Peningkatan realisasi disumbang antara lain dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp15,26 T atau tumbuh 117 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas batubara. Disamping itu, kenaikan pendapatan disumbang dari Pendapatan Layanan administrasi Hukum (antara lain pembuatan visa, paspor) Rp1,34 triliun atau tumbuh 35,5 persen (yoy), Pendapatan Layanan Kesehatan Rp0,78 triliun atau tumbuh 35,9 persen (yoy), dan Pendapatan Layanan Kepolisian (terutama dari fungsi lintas) Rp2,63 triliun atau tumbuh 6,6 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan terus membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp20,23 triliun atau 25,67 persen dari target APBN 2022. Realisasi PNBPLU mengalami kontraksi sebesar 36,36 persen (yoy). Penurunan

ini utamanya disebabkan penurunan pendapatan pungutan sawit akibat turunnya volume ekspor sampai dengan bulan April 2022. Disamping itu, kontraksi juga disumbang dari penurunan pendapatan layanan pendidikan akibat alih status beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU menjadi PTN Badan Hukum.

Halaman Ini Dikосongkan

A woman wearing a yellow hard hat, a brown hijab, a blue long-sleeved shirt, and a high-visibility yellow safety vest is working in a warehouse. She is holding a black marker in her right hand and writing on a white label on a cardboard box. In her left hand, she holds a blue clipboard. The background shows blue metal shelving units filled with cardboard boxes.

**Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat (BPP)
pada awal tahun
2022 utamanya
untuk penyaluran
bansos dan
pembayaran
kewajiban
Pemerintah**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan April 2022 mencapai Rp508,03 triliun atau 26,13 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut utamanya untuk penyaluran bansos, serta pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai, pensiun, serta subsidi.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp253,58 triliun atau 26,81 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan

untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional serta bansos.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp81,02 triliun atau 30,44 persen dari pagu APBN tahun 2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri, serta pembayaran THR.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	APBN 2022	Realisasi s.d April	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	945,75	253,58	26,81	(8,96)
Belanja Pegawai	266,18	81,02	30,44	15,27
Belanja Barang	337,94	77,01	22,79	(21,99)
Belanja Modal	199,20	33,37	16,75	(30,63)
Bantuan Sosial	142,43	62,18	43,66	1,21
Belanja Non-K/L	998,79	254,45	25,48	20,43
a.l. Belanja Pegawai	160,35	58,84	36,69	1,19
Subsidi	206,96	56,63	27,36	39,01
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.944,54	508,03	26,13	3,71

(dalam Triliun Rupiah)

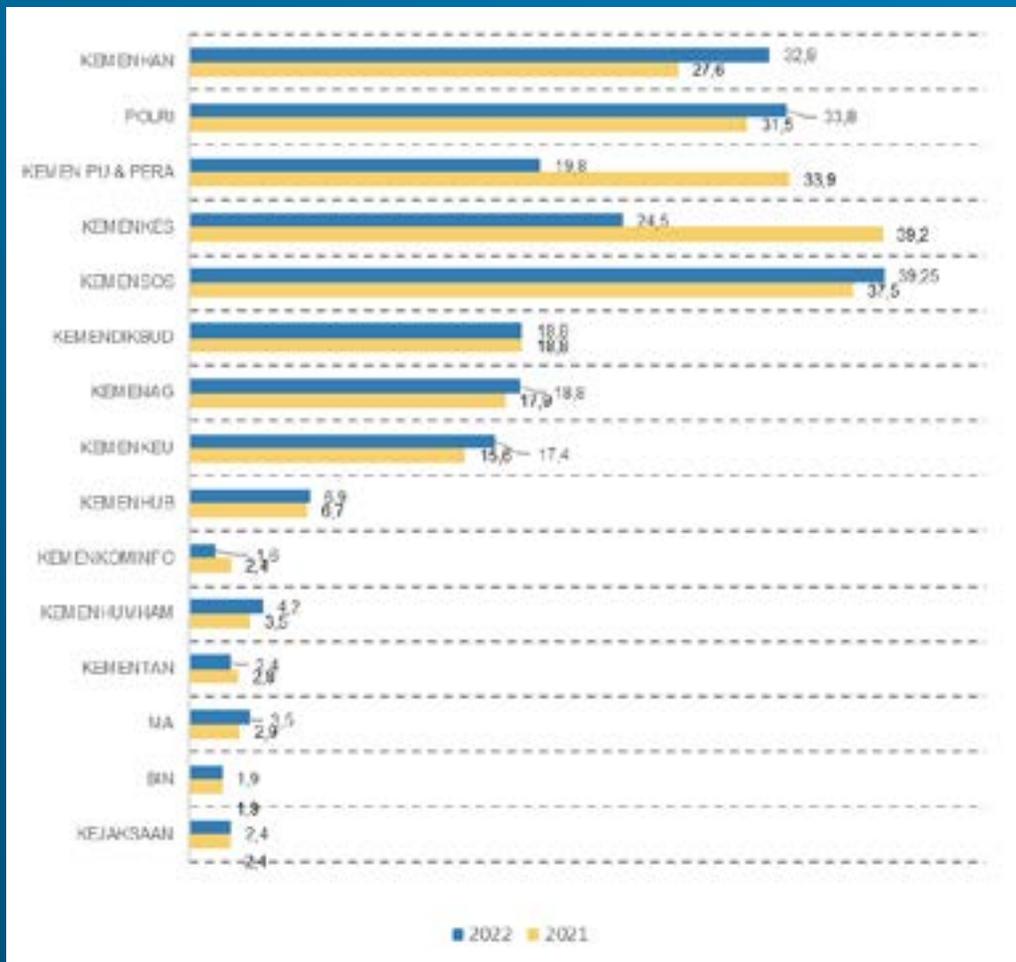
Realisasi Belanja Barang tahun 2022 mencapai Rp77,01 triliun atau 22,79 persen dari pagu APBN tahun 2022. Meskipun realisasi belanja barang tersebut lebih rendah dari tahun 2021, namun untuk penanganan Covid-19 kondisinya sudah mulai membaik sehingga alokasi untuk anggaran kesehatan menjadi lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan pandemi di awal tahun 2022 sudah terkendali yang ditunjukkan oleh pengadaan vaksin Covid-19 sudah mencukupi. Realisasi yang lebih rendah di 2022 juga dikarenakan terdapat realisasi BPUM yang cukup besar sampai dengan April tahun 2021. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang utamanya digunakan untuk program BOS pada siswa, BLU Kelapa Sawit, kegiatan layanan perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya pada beberapa K/L seperti POLRI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, realisasi belanja barang juga digunakan untuk melanjutkan penanganan dampak Covid-19, seperti bantuan tunai untuk 2,0 juta PKL Warung dan Nelayan dan 167,1 ribu pasien Covid-19 yang mendapat biaya perawatan serta ICT dalam rangka penyediaan BTS sewa

jaringan untuk pemutakhiran DTKS*.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 April 2022 mencapai Rp33,37 triliun atau 16,75 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja modal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 dikarenakan pada awal tahun 2021 dilakukan relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 ke awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan April 2022 mencakup: (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung pada Kemhan, Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama, (3) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan

*) Per 13 Mei 2022

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 30 April TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)



konektivitas pada Kementerian PUPR dan Kemenhub.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp62,18 triliun atau 43,66 persen dari pagu APBN tahun 2022. Realisasi Bansos tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2021 yang dipengaruhi oleh percepatan pencairan bantuan program Kartu Sembako bulan Mei di Bulan April serta pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan harga komoditas. Adapun pemanfaatan realisasi Bansos pada periode sampai dengan 30 April 2022 antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan PKH tahap II kepada 10 juta keluarga, penyaluran bantuan Kartu Sembako bulan Januari s.d. Mei kepada 18,8 juta keluarga, pembayaran bantuan premi iuran JKN bagi 84,9 juta jiwa peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan penyaluran bantuan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 10,2 juta siswa serta bantuan pendidikan KIP Kuliah kepada 612,7 ribu mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 April 2022

utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 89,89 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. K/L bidang infrastruktur mengalami perlambatan dikarenakan tidak adanya pembayaran pekerjaan akhir tahun 2021 dan belum mulainya pencairan untuk pekerjaan tahun 2022. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 April 2022 mencapai Rp254,45 triliun, tumbuh 20,43 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun dan subsidi energi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp58,84 triliun atau 36,69 persen dalam pagu APBN 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk THR) dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 30 April 2022 naik sebesar 39,01 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp56,63 triliun, terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp46,36 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi Non Energi sebesar Rp10,27 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, dan Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 30 Maret 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 4,15 juta KI, LPG 3 Kg mencapai 1,87 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,36 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 15,01 TWh.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi Non Energi sampai dengan 30 April 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 2,96 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 2,72 juta debitur dengan total

penyaluran KUR mencapai Rp125,56 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 38,38 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp20,4 triliun. Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi BBM sebesar Rp18,1 triliun dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp1,8 triliun. Program Kartu Prakerja yang dihadirkan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan mengembangkan kewirausahaan peserta/ angkatan kerja, sampai dengan 30 April 2022 telah disalurkan kepada 609 ribu peserta. Dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran penyaluran Kartu Prakerja, pada tahun 2022 telah dilakukan penambahan *layer* proses seleksi calon peserta dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Halaman Ini Dikосongkan



**Penyaluran
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa (TKD)
sampai dengan
30 April 2022
telah terealisasi
sebesar
Rp242,43 triliun**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 April 2022 telah terealisasi sebesar **Rp242,43 triliun** atau 31,50 persen dari pagu APBN 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp 220,13 triliun atau 31,37 persen dari pagu APBN 2022 dan Dana Desa Rp22,30 triliun atau 32,79 persen dari pagu APBN 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,95 persen (*yoy*).

A. DANA PERIMBANGAN

Hingga 30 April 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp18,32 triliun atau 17,41 persen dari pagu APBN 2022, jumlah ini berasal dari penyaluran DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Penyaluran DBH lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,5 triliun. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp18,3 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp15,4 triliun.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021 Dan 2022

Tanggal 1-30 April 2022

Uraian	2021		2022		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48^a	233.206,64	769.613,47	242.479,92	31,50
Transfer ke Daerah	723.479,48	216.353,51	701.613,47	220.131,57	31,37
A. Dana Perimbangan	688.676,56	210.975,32	672.857,20	213.146,89	31,68
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	169.195,33	483.263,36	172.760,62	35,75
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	34.856,11	105.263,36	18.322,10	17,41
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	134.339,22	378.000,00	154.438,52	40,86
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	41.779,99	189.593,84	40.386,27	21,29
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.240,20	890,04	60.874,00	776,87	1,25
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	40.881,95	128.719,84	39.609,40	30,77
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	539,89	7.000,00	655,80	9,37
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	4.830,30	21.756,26	6.328,05	29,09
1. Dana Otsus	19.982,92	4.640,30	20.436,26	6.130,88	30,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	1.586,72	8.805,00	2.551,50	30,00
b. Provinsi Aceh	7.805,83	2.266,75	7.560,00	2.268,00	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	786,83	4.371,26	1.311,38	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	198,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	72.000,00	16.853,12	68.000,00	22.298,35	32,79

(dalam Miliar Rupiah)

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada akhir April 2022 telah mencapai Rp154,44 triliun atau 40,86 persen dari pagu APBN 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 14,96 persen (yoy). Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Hingga 30 April 2022, terdapat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp776,87 miliar atau 1,25 persen dari pagu APBN 2022. Penyaluran DAK Fisik secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 15,43 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan antara lain karena penyaluran DAK Fisik Penugasan yang turun sebesar 27,87 persen. Sedangkan DAK Nonfisik terdapat realisasi sebesar Rp39,61 triliun atau 30,77 persen dari pagu APBN 2022, mengalami penurunan sebesar 3,11 persen (yoy). Penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah disebabkan antara lain penurunan kinerja pemerintah daerah

dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran DAK Nonfisik terutama untuk Dana BOK, Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID dimana penyaluran DID Tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari setiap tahunnya. Adapun realisasi penyaluran sampai dengan 30 April 2022 adalah sebesar Rp655,80 miliar atau 9,37 persen dari pagu APBN 2022. Penyaluran DID lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar 21,47 persen (yoy).

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2022 adalah sebesar Rp6,13 triliun atau 30,00 persen dari pagu APBN 2022, naik 6,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Mulai tahun 2022 penyaluran Dana Otonomi Khusus langsung ke

RKUD kabupaten/kota untuk daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat adapun Dana Otonomi Khusus Aceh disalurkan dari RKUN ke RKUD provinsi. Sedangkan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp198 miliar atau 15,00 persen dari pagu APBN 2022.

B. DANA DESA

Sampai dengan 30 April 2022, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp22,30 triliun atau 32,79 persen dari pagu APBN 2022. Secara umum, penyaluran Dana Desa di bulan April tahun 2022 lebih tinggi Rp5,45 triliun atau naik 32,31 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan telah banyak pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp7,47 triliun kepada 6,12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 60.370 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp5,75 triliun atau

333,60 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus.

Selain itu, Dana Desa juga tetap di-*earmark* atau telah ditentukan penggunaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di level desa dan program ketahanan pangan dan hewani.

Halaman Ini Dikосongkan

A woman wearing a large green conical hat and a colorful patterned shirt is working with rice in a traditional setting. She is looking down at a large pile of white rice in a wooden tray. The background is blurred, showing more rice and wooden structures.

**Strategi
Pembiayaan
Disesuaikan Untuk
Merespon Gejolak
Pasar Keuangan,
Dinamika APBN dan
Kas Serta *Demand*
Investor**

Pembiayaan Utang

Defisit fiskal pada APBN 2022 dianggarkan sebesar 4,85 persen, lebih rendah dari target tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal. Diharapkan pada tahun 2023 defisit fiskal Indonesia dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun sesuai pagu APBN 2022.

Sampai dengan akhir April 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar

Rp155,87 triliun atau 16,0 persen pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp142,23 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,65 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,83 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,49 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp40,37 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp27,07 triliun.

Pembiayaan utang Sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi

Pembiayaan Utang

hingga 30 April 2022

“Sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional



“Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi melalui berbagai instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang minimal.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pasar domestik, Pemerintah setiap tahunnya menerbitkan Surat Berharga Negara secara prudent dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan anggaran. Selama bulan April, Pemerintah melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya (tanggal 5, 12, dan 19 April 2022), secara bergantian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta dua kali lelang tambahan (*Greenshoe Option/GSO*) yaitu pada tanggal 13 dan 20 April 2022. Selain itu, terdapat pula penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

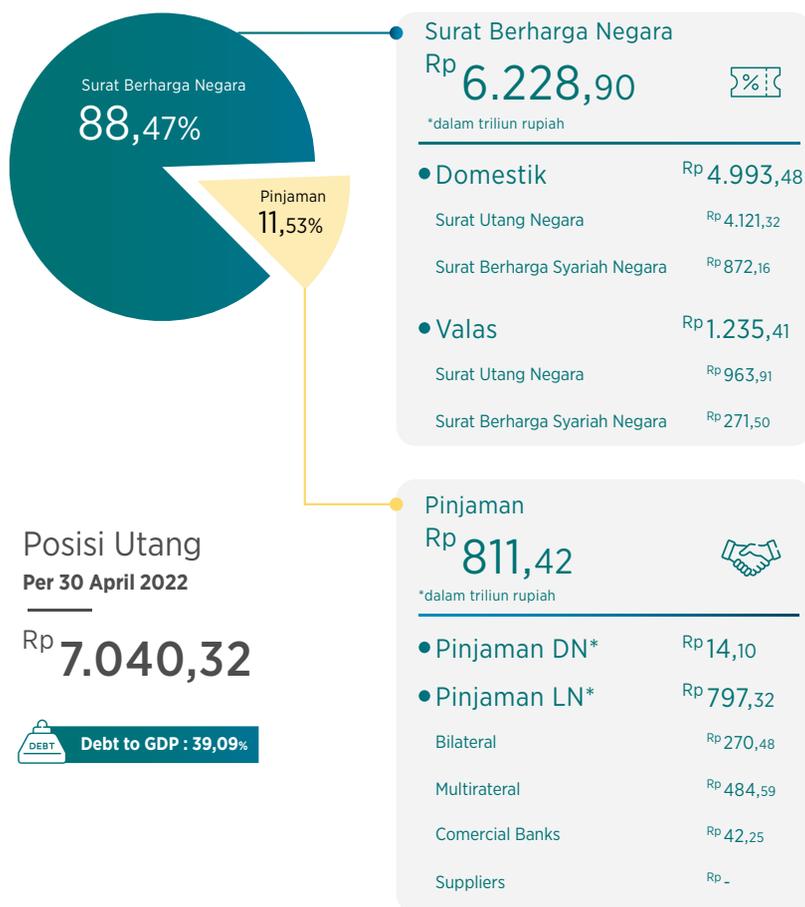
pada SBN yang dilakukan pada 21 April 2022 dengan total sebesar Rp351,16 miliar.

Selanjutnya, pada bulan April 2022, Pemerintah juga membuka masa penawaran Sukuk Wakaf Ritel (SWR003) yang akan berakhir pada 7 Juli 2022. SWR003 merupakan perwujudan dari komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, serta guna membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Komposisi Utang

hingga 30 April 2022

Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali



Sampai dengan akhir April 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.040,32 triliun dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 39,09 persen. Secara nominal, terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan realisasi bulan Maret 2022.

Pengelolaan Utang Pemerintah dilakukan secara *prudent*, fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali. Utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,47 persen dari seluruh komposisi utang akhir April 2022. Secara mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 71,13 persen.

Utang Pemerintah digunakan sebagai *counter-cyclical* untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif seperti antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, DAK fisik, dana desa, serta pembangunan infrastruktur guna memperkecil indeks *infrastructure gap*. Belanja produktif tersebut merupakan investasi bagi Pemerintah yang hasilnya memiliki efek multiplier berlipat dan dapat dirasakan hingga masa mendatang. Selain itu, selama tahun 2020-2022 terdapat peningkatan kebutuhan belanja akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kebutuhan

belanja tersebut antara lain diperuntukkan guna menyangatkan masyarakat melalui pengadaan vaksin, insentif nakes, dan biaya perawatan Covid-19; melindungi masyarakat rentan dan terdampak melalui penyaluran program-program bantuan sosial; serta mendukung ketahanan dan membangkitkan dunia usaha melalui berbagai insentif dan kemudahan kredit yang diberikan.

Pengelolaan utang Indonesia yang *prudent* tak luput dari apresiasi lembaga pemeringkat kredit. Pada 27 April lalu, S&P mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dan merevisi outlook dari yang sebelumnya negatif menjadi *stable*. Afirmasi peringkat Indonesia oleh S&P pada BBB dengan *stable outlook* mencerminkan optimisme investor internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah tantangan global maupun domestik. Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi dan memperbaiki *outlook* dari negatif menjadi stabil. Peningkatan *outlook* tersebut menunjukkan

kepercayaan S&P terhadap perekonomian Indonesia yang membaik dengan cepat dan kuat didukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta kebijakan makroekonomi yang efektif.

Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Defisit APBN 2022 yang terus menurun dibandingkan target defisit tahun 2020 dan 2021 menunjukkan upaya Pemerintah untuk kembali bertahap menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB di tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus menjaga rasio utang, utamanya dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang, seperti

optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB I dan SKB III dengan BI. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan Kerjasama (*partnership*) berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair. Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), *Blended Financing* serta *Sustainable Development Goals* (SDG) *Indonesia One*.

Halaman Ini Dikосongkan

